

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEBARAN INFORMASI
PUBLIK MENGENAI *DEPOK CYBER CITY*
PADA DISKOMINFO KOTA DEPOK**

Tesis
Untuk memenuhi sebagian
Persyaratan dalam mencapai derajat S-2

Program Studi
Magister Administrasi Publik (MAP)

Diajukan Oleh:

Nama : MISROJI
NIM : 2012-02-010



**PROGRAM PASCASARJANA (S2)
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
JAKARTA
2014**

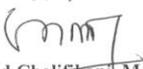
LEMBAR PENGESAHAN PENELITIAN TESIS



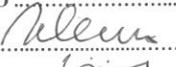
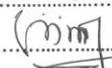
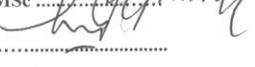
Nama Mahasiswa : **MISROJI**
NIM : 2012-02-010
Program Studi : **MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

Telah dinyatakan lulus ujian Tesis pada tanggal 12 Juli 2014 dihadapan Pembimbing dan Penguji di bawah ini.

Pembimbing,


Muhammad Cholifihani, MA, Ph.D.

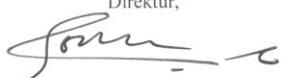
Tim Penguji :

KETUA : **Ir. Roesfiansjah Rasjidin, MT., Ph.D.** 
ANGGOTA : 1. **Dr. Ir. Tatag Wiranto, MURP** 
2. **Muhammad Cholifihani, MA, Ph.D.** 
3. **Dr. Deddy Bratakusumah, MURP, MSc** 
4. **Dr. Harries Madiistriyatno, M.Si** 

Jakarta, 12 Juli 2014

UNIVERSITAS ESA UNGGUL
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (S-2)

Direktur,


Ir. Roesfiansjah Rasjidin, MT., Ph.D.

SURAT PERNYATAAN

Dengan surat ini saya menyatakan bahwa karya tulis saya ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Esa Unggul maupun di Perguruan Tinggi lain. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis menjadi acuan dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku di Universitas Esa Unggul.

Jakarta, Juli 2014



METERAI
TEMPEL
9BCD3ACF226152331
6000
Kisroji

PRAKATA

Alhamdulillah rabbil 'alamien, kalimat inilah yang paling pertama Penulis ucapkan atas terselesaikannya tugas akhir (tesis) sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP), Universitas Esa Unggul, Jakarta.

Selanjutnya, terselesaikannya tesis ini Penulis dapatkan banyak terbantu, terutama oleh Pembimbing Tesis, Bapak Dr. Muhammad Cholifihani, MA, Ph.D. Beliaulah yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing Penulis hingga akhirnya dapat menuntaskan penelitian ini.

Selain itu, Penulis juga merasa berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam mengantarkan Penulis menyelesaikan studi MAP pada Universitas Esa Unggul, antara lain:

1. Bapak Ir. Roesfiansjah Rasjidin, MT., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Esa Unggul, Jakarta
2. Bapak Dr. Ir. Tatag Wiranto, MURP selaku Ketua Program Studi MAP Universitas Esa Unggul, Jakarta
3. Para dosen Prodi Magister Administrasi Publik Universitas Esa Unggul
4. Bapak Fitriawan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok yang telah membantu melancarkan pelaksanaan penelitian di kantor Diskominfo.
5. Ibu Mey dan seluruh pegawai Diskominfo Kota Depok yang telah bersedia membantu menyebarkan serta mengisi kuesioner dengan baik.
6. Istri dan anak-anak Penulis yang telah merelakan waktunya bagi Penulis untuk segera menyelesaikan studi magister ini.
7. Karyawan dan Karyawati Prodi MAP, terutama Mbak Indri, Mbak Rita, dan Bang Puzar, yang telah banyak membantu dalam kemudahan beradministrasi.
8. Teman-teman kelas MAP Angkatan ke-16, Pak Nuryahman, Toharudin, Oman Sumantri, Bu Lies, Bu Itoh, Bu Oci, dan lainnya

“Tak ada gading yang tak retak”. Meminjam pepatah ini, maka Penulis dengan kerendahan hati membuka ruang kritik dan saran dari pembaca bagi perbaikan tesis ini demi menjaga kualitas, baik metodologi, konten, maupun hasilnya.

Jakarta, Juli 2014

Penulis,

Misroji

ABSTRAK

MISROJI. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Mengenai 'Depok Cyber City' pada Diskominfo Kota Depok (Dibimbing oleh Muhammad Cholifahani, Ph.D)*

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2011-2016 yang tertuang dalam Perda Nomor 13 Tahun 2011, tertera salah satu Program Unggulan Daerah yaitu *Depok Cyber City*. Program andalan ini merupakan skala prioritas dalam memecahkan permasalahan utama yang dihadapi Kota Depok.

Konsep '*Depok Cyber City*' bertujuan untuk mempermudah masyarakat Depok, mulai dari anak TK sampai ibu rumah tangga, mengakses informasi apa saja dan dari mana saja yang terkait dengan informasi publik.

Untuk mengukur dapat atau lancar dan tidaknya program atau kebijakan mencapai sasaran atau tujuan seperti yang diinginkan, Edward III berpendapat ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan positivis. Populasi sekaligus respondennya adalah seluruh pimpinan dan pegawai di Diskominfo Kota Depok yang berjumlah 34 orang.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, untuk mengukur seberapa besar variabel-variabel komunikasi, sumber daya manusia, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi dapat menjelaskan variabel dependen implementasi kebijakan penyebaran informasi publik mengenai *Depok Cyber City*. Uji hipotesis dilakukan dengan t-test untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Sedangkan untuk menguji variabel independen secara simultan digunakan F-test.

Hasil penelitian ini menunjukkan memang terdapat pengaruh yang signifikan variabel komunikasi, sumber daya manusia, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi publik tentang *Depok Cyber City* simultan sebesar 91,7 persen. Sedangkan sisanya 8,3 persen dipengaruhi oleh faktor lain.

Namun, berdasarkan uji t, hanya faktor disposisi yang tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan t-hitung dari faktor ini sebesar 0,099, sementara t-tabelnya sebesar 1,691.

Sedangkan ketiga faktor lainnya memberikan pengaruh yang signifikan, dimana faktor komunikasi memiliki signifikansi tertinggi yakni sebesar 3,252, disusul faktor sumberdaya sebesar 2,637, dan struktur birokrasi sebesar 1,798.

Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran bagi Diskominfo Kota Depok untuk memperbaiki faktor sikap seperti komitmen para pegawainya untuk menyukseskan program *Depok Cyber City*.

ABSTRACT

MISROJI. *Analysis of Factors Affecting the Implementation of Public Policy of Information Dissemination Regarding 'Depok Cyber City' on Diskominfo of Depok City* (Supervised by Muhammad Cholifihani, Ph.D)

In the Medium Term of Development Plan (RPJMD) of Depok City (2011 to 2016) that was contained in Regulation No. 13 of 2011, one of the programs listed of Featured Regions namely *Depok Cyber City*. The flagship program is a priority in solving the major problems facing the city of Depok.

The concept of *Depok Cyber City* aims to facilitate the public of Depok, ranging from kindergarten students to housewives, to access any information from anywhere and related public information.

To be able to measure whether or current programs or policies and achieve the goals or objectives as desired, Edward III believes that there are four (4) factors which influence the success of policy implementation are communication, resources, disposition, and bureaucratic structures.

This research is a quantitative study with the positivist approach. Population whose also respondents are all leader and staffs in Diskominfo, totaling 34 people.

The analysis used in this study is a multiple linear regression analysis, to measure how much variables communications, human resources, disposition (attitude), and bureaucratic structures able to explain the dependent variable implementation of policies regarding the dissemination of public information regarding *Depok Cyber City*. Hypothesis testing is done by t-test to examine the effect of partially independent variable against the dependent variable. As for the independent variables tested simultaneously used the F-test.

The results of this research showed there is a significant effect of variables communications, resources, disposition (attitude), and the bureaucratic structure from the implementation policy of dissemination public information about the *Depok Cyber City* simultaneously at 91.7 percent. While the remaining 8.3 percent are influenced by other factors.

However, based on the t-test, only the disposition of the factors that have a no positive influence on the success of the policy. This is because the t-test of the factor of 0.099, while the t-table is 1.691.

While the three other factors have a significant influence, in which the communication factor has the highest significance, amounting to 3,252, followed by 2,637 resource factors, and the bureaucratic structure of 1.798.

The results of this study may be a figures for Diskominfo of Depok City to improve some factors, such as the attitude of the employee's commitment to get the success of the *Depok Cyber City*'s program.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pernyataan	iii
Prakata	iii
Abstrak	iv
Abstract	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	18
1.3. Batasan Masalah.....	19
1.4. Rumusan Masalah	19
1.5. Tujuan Penelitian.....	20
1.6. Manfaat Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Teori Kebijakan Publik	22
2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik	22

2.1.2. Tipe-tipe Model Kebijakan	24
2.1.3. Implementasi Kebijakan Publik	27
2.1.4. Model Implementasi Kebijakan Publik	29
2.2. <i>Depok Cyber City</i> (DCC)	40
2.3. Penyebaran Informasi Publik	45
2.4. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	47

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Kerangka Penelitian... ..	51
3.2. Hipotesis Penelitian	53
3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	54
3.4. Teknik Pengumpulan Data dan Pengambilan Sampel.....	57
3.6. Metode Analisis.....	62
3.7. Lokasi Penelitian	64
3.8. Populasi dan Sampel	65

BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian	66
4.2. Pembahasan	72
4.2.1. Profil Responden	72
4.2.2. Hasil Uji Kualitas Data.....	75
4.2.3. Pengujian Hipotesis	105
4.2.4. Pembahasan Hasil Penelitian.....	112

BAB V KESIMPULAN dan SARAN

5.1. Kesimpulan	115
5.2. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA	118
-----------------------------	------------

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	48
Tabel 3.1.	Variabel, Dimensi, dan Indikator Penelitian	54
Tabel 4.1	Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	73
Tabel 4.2	Profil Responden Dikelompokan Berdasarkan Pendidikan Terakhir	73
Tabel 4.3	Profil Responden Dikelompokan Berdasarkan Golongan Jabatan	74
Tabel 4.4	Profil Responden Dikelompokan Berdasarkan Usia	74
Tabel 4.5	Hasil Uji Validitas	76
Tabel 4.6	Hasil Uji Reliabilitas	76
Tabel 4.7.	Hasil Uji Normalitas Populasi	78
Tabel 4.8.	Hasil Uji Homogenitas Populasi	79
Tabel 4.9	Tanggapan Responden Terhadap Frekuensi Sosialisasi DCC	80
Tabel 4.10	Tanggapan Responden terhadap Pengadaan Pelatihan IT DCC	
Tabel 4.11	Tanggapan Responden terhadap Bahasa yang Digunakan dalam Penyuluhan DCC	84
Tabel 4.12	Tanggapan Responden terhadap Materi Tertulis yang Digunakan dalam Penyuluhan DCC	84
Tabel 4.13	Tanggapan Responden terhadap Sosialisasi secara tidak Langsung mengenai IT DCC	85
Tabel 4.14	Tanggapan Responden terhadap Tersedianya Pedoman Cara Pelaksanaan Sosialisasi mengenai IT DCC	86
Tabel 4.15	Tanggapan Responden terhadap Tingkat Kejelasan Isi Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi DCC	86
Tabel 4.16	Tanggapan Responden terhadap Tingkat Pemahaman Tujuan Kebijakan DCC	87

Tabel 4.17	Tanggapan Responden terhadap Jumlah Tenaga SDM Program Sosialisasi DCC	88
Tabel 4.18	Tanggapan Responden terhadap Keterlibatan SDM Program Sosialisasi DCC	88
Tabel 4.19	Tanggapan Responden terhadap Ketersediaan Fasilitas DCC	89
Tabel 4.20	Tanggapan Responden terhadap Ketersediaan Bahan Pendukung Sosialisasi DCC	90
Tabel 4.21	Tanggapan Responden terhadap Kemudahan Penggunaan Sapas dalam Mendukung Kebijakan DCC	90
Tabel 4.22	Tanggapan Responden terhadap Keterpeliharaan Sapras dalam Mendukung Kebijakan DCC	91
Tabel 4.23	Tanggapan Responden terhadap Bantuan Khusus Pemerintah Pusat dalam Mendukung Kebijakan DCC	92
Tabel 4.24	Tanggapan Responden terhadap Ketersediaan Dana dalam Mendukung Kebijakan DCC	92
Tabel 4.25	Tanggapan Responden terhadap Peningkatan Pengetahuan Mengenai DCC	93
Tabel 4.26	Tanggapan Responden terhadap Pemberian Insentif Pelaksanaan Program Sosialisasi DCC	94
Tabel 4.27	Tanggapan Responden terhadap Pemberian Insentif setelah Pelaksanaan Sosialisasi DCC	94
Tabel 4.28	Tanggapan Responden terhadap insentif yang diberikan Bernilai Penting dalam Mendukung Kebijakan DCC	95
Tabel 4.29	Tanggapan Responden terhadap Ketersediaan SOP dalam Mendukung Kebijakan DCC	96
Tabel 4.30	Tanggapan Responden terhadap Kejelasan SOP sebagai Acuan dalam Mendukung Kebijakan DCC	96
Tabel 4.31	Tanggapan Responden terhadap Ketersediaan Tim Khusus dalam Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan DCC	97

Tabel 4.32	Tanggapan Responden terhadap <i>Job Description</i> Tim Khusus dalam Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan DCC	98
Tabel 4.33	Tanggapan Responden terhadap Pertemuan Berkala dengan Komunitas IT dalam Kebijakan DCC	98
Tabel 4.34	Tanggapan Responden terhadap Sosialisasi Informasi Kebijakan <i>Depok Cyber City</i> (DCC) Berhasil Dikomunikasikan Seluruh <i>Stakeholder</i>	99
Tabel 4.35	Tanggapan Responden terhadap Sosialisasi Informasi Kebijakan <i>Depok Cyber City</i> (DCC) sesuai Sasaran dan Tujuan 100.....	100
Tabel 4.36	Tanggapan Responden terhadap Sosialisasi Informasi Kebijakan <i>Depok Cyber City</i> (DCC) semua Elemen	100
Tabel 4.37	Tanggapan Responden terhadap Keterlibatan Pegawai Diskominfo Kota Depok dalam Sosialisasi Informasi Kebijakan DCC	101
Tabel 4.38	Tanggapan Responden terhadap Kesiapan Pegawai Diskominfo Kota Depok Mensukseskan Sosialisasi Informasi Kebijakan DCC	102
Tabel 4.39	Tanggapan Responden terhadap Diskominfo Kota Depok dalam Koordinasi dengan OPD Mensukseskan Sosialisasi Informasi Kebijakan DCC	102
Tabel 4.40	Tanggapan Responden terhadap Penilaian Umum tentang Keberhasilan Sosialisasi Informasi DCC	103
Tabel 4.41	Tanggapan Responden terhadap Diskominfo dalam Koordinasi dengan OPD.....	104
Tabel 4.42.	Tanggapan Responden terhadap Penilaian Umum tentang Keberhasilan Sosialisasi Informasi DCC.....	104
Tabel 4.43.	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Model <i>George Edwards III</i> (Faktor-faktor pengaruh implementasi kebijakan)	47
Gambar 3.2	Model Analisis Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi pada Diskominfo Kota Depok	48
Gambar 4.1.	Struktur Organisasi Diskominfo Kota Depok	68
Gambar 4.2.	Kurva Uji F	109
Gambar 4.3.	Kurva Uji t	110

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Instrumen Penelitian
- Lampiran 2. Data Hasil Penelitian
- Lampiran 3. Uji Validitas dan Reliabilitas
- Lampiran 4. Pengujian Persyaratan Analisis
- Lampiran 5. Hasil Analisis Distribusi Frekuensi
- Lampiran 6. Hasil Perhitungan Regresi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Era reformasi di Indonesia yang bergulir sejak kejatuhan pemerintahan Orde Baru, 21 Mei 1998, telah menghembuskan angin segar bagi keterbukaan informasi publik. Informasi publik sebelumnya nyaris tertutup sama sekali karena rezim yang berkuasa tidak mengharapkan adanya keterbukaan kepada masyarakat yang ia pimpin.

Informasi publik yang dimaksud adalah hal-ihwal yang terkait dan berurusan dengan informasi mengenai kebijakan pemerintah yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, serta mesti diketahui dan dipahami oleh masyarakat secara luas pula.

Dalam perkembangan era reformasi tersebut, tak dapat ditampik bahwa informasi yang menyebar di tengah-tengah masyarakat sedemikian kerapnya, sehingga diperlukan kejelasan dan keakuratan sebuah informasi publik. Kejelasan dan keakuratan informasi publik sangat diperlukan demi menepis isu-isu yang berhembus di tengah kehidupan masyarakat.

Melihat vitalitas dan urgensitasnya, maka yang paling berhak menguasai serta menyebarkan informasi publik adalah badan-badan publik yang memiliki tugas pokok, fungsi, serta kewenangan tersendiri yang diatur oleh undang-undang. Informasi yang disebarkan akan berefek pada kehidupan masyarakat.

Sebaran informasi di masyarakat yang sangat luas jangkauannya se-Nusantara, dengan berbagai faktornya mempengaruhi tingkat kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi tersebut. Tingkat kemampuan masyarakat dalam menangkap informasi bergantung pada eksistensi dan situasi yang mereka hadapi.

Misalnya, kelompok masyarakat yang tinggal di perdesaan dan perkotaan akan berbeda dalam menerima informasi publik, baik dalam hal tingkat pendidikan, saran dan prasarana penunjang teknologi komunikasi dan informatika, maupun dalam soal kesenjangan perekonomiannya. Kondisi inilah yang memunculkan kesenjangan dalam penyebaran informasi publik. Cakupan luasnya geografi di Indonesia juga mempengaruhi tingkat kecepatan dan pemerataan dalam penyebaran informasi publik.

Meski demikian, sebagaimana tuntutan reformasi, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan (*obligation to tell*) dan menyebarkan informasi publik, yaitu segala informasi yang mengandung kebijakan publik yang dikeluarkan oleh lembaga tinggi negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.¹

Di sisi lain, warga negara atau masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui (*right to know*) segala informasi mengenai kebijakan pemerintah

¹ Periksa pada Pasal 9, 10, 11, dan 12 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang secara terperinci mencantumkan tentang kewajiban Badan Publik untuk menginformasikan segala hal yang terkait dengan kebijakan publik.

karena hal ini berkaitan dengan kehidupan mereka, baik di masa kini maupun masa yang akan datang.²

Berbagai informasi yang terkait dengan kebijakan publik seperti di bidang ekonomi, politik, dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya kian bernilai harganya di era keterbukaan seperti sekarang ini. Kebijakan publik tak bisa lagi ditentukan oleh satu-dua pihak seperti eksekutif dan legislatif, namun tuntutan masyarakat membuat kebijakan mau tidak mau harus melibatkan semua stakeholder. Masyarakat tak lagi dijadikan sebagai obyek tapi lebih jauh lagi menjadi subyek dari produk kebijakan. Di sinilah letak signifikansi akan pentingnya komunikasi timbal balik antara pembuat kebijakan dan masyarakat, serta umpan balik dari masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.

Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menyebarkan informasi publik melalui lembaga-lembaga atau badan resmi yang ditunjuk tentu juga memiliki kewenangan untuk menyajikan informasi tersebut secara lengkap sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Hal ini berbeda sudut pandangannya dengan penyajian dan penyebaran informasi yang dikemas oleh media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Informasi yang disebarkan media telah mengalami konstruksi realitas dan agenda setting sesuai dengan kepentingan pengelola media.³ Sehingga apa

² Periksa pada Pasal 4 UU Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin setiap orang untuk memperoleh informasi publik sebagaimana tertuang dalam undang-undang tersebut.

³ Lihat Ibnu Hamad, "Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa", Jakarta: Granit, 2004, hlm. 11. Menurutnya, tentang proses konstruksi realitas, prinsipnya setiap upaya "menceritakan" (konseptualisasi) sebuah peristiwa, keadaan, atau benda tak terkecuali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan politik, adalah usaha mengkonstruksikan realitas.

yang disajikan media, terutama dalam format berita, terkesan terbatas dan kurang lengkap.

Dengan demikian, lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menyebarkan informasi publik diharapkan mampu melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka, tepat waktu dan sasaran, mudah diakses, terdistribusi secara merata.

Tinggal bagaimana pemerintah memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan informasi publik dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sebab, dengan tersedianya sarana dan prasarana ini memungkinkan tersebarnya informasi publik sebagaimana yang diharapkan dapat tercapai.

Masyarakat kian berkembang dan menuntut akan terwujudnya kemudahan dalam mengakses informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Tugas pemerintahlah untuk menyediakan akses tersebut dengan menyediakan sarana dan prasarananya.

Tuntutan masyarakat agar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik telah melahirkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sejak dua tahun diundangkan pada tanggal 30 April 2010, tiap-tiap badan publik khususnya lembaga negara yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraa negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, berkewajiban menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi

publik yang berada di bawah kewenangannya pada kepada pemohon atau pengguna informasi publik (Budiman, 2011: 1)

Informasi publik, menurut Undang-undang tersebut, bersifat terbuka dan sudah seharusnya dapat dan mudah diakses oleh setiap pengguna informasi publik, yaitu masyarakat. Terkecuali informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang-undang (Rahasia Negara), kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya, atau sebaliknya.

Keterbukaan informasi publik juga menjadi bagian dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu karakteristik dari implementasi *good governance* tersebut adalah dikedepankannya prinsip transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Tahir (2010:175) prinsip transparansi atau keterbukaan (*opennes*) tidak saja mengarah akan adanya kejelasan mekanisme formulasi, implementasi serta evaluasi terhadap sebuah kebijakan, akan tetapi juga terbukanya kesempatan bagi khalayak untuk memberikan tanggapan, usul, bahkan kritik atas berbagai kebijakan pemerintah.

Good governance, menurut Utomo (2006:186) disemangati oleh setidaknya 5 (lima) unsur utama yaitu: penegakan hukum (*rule of law*), akuntabilitas, transparansi atau keterbukaan (*opennes*), profesionalisme, dan partisipasi. Unsur transparansi menghendaki adanya kejelasan arah tentang mekanisme formulasi, implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan, program

atau aktivitas, ditambah pula tersedianya keterbukaan dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan, usul maupun kritik. Ditambah dengan partisipasi yang merupakan bentuk dari terbukanya akses bagi seluruh stakeholder untuk ikut serta dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.

Negara yang sudah menjamin kebebasan informasi publik tersebut, tentu harus diikuti oleh komitmen Pemerintah dalam mewujudkan badan atau lembaga yang *concern* memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan akses keterbukaan informasi. Badan tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang memayungi Badan Informasi Publik (BIP). Keberadaan BIP ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Badan ini memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan informasi publik.

Di tingkat daerah, BIP menyatu atau satu atap dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Seperti Diskominfo di Kota Depok, Jawa Barat, BIP berada di bawah Dinas ini. Tugas pokok dan fungsi dari sub bidang ini adalah sebagai berikut:

- (1) Bidang Informasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang informasi publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informasi Publik mempunyai fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Informasi Publik mengacu pada rencana strategis dinas;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan informasi publik melalui berbagai media informasi;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga, dan komunitas masyarakat;
- d. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembangunan, pengembangan, pengendalian pemeliharaan dan pemerataan pelayanan diseminasi informasi;
- e. Pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis serta pengendalian di bidang informasi publik;
- f. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang informasi publik;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Salah satu rencana kerja BIP yang mengacu pada rencana strategis dinas adalah menyosialisasikan Program Unggulan *Depok Cyber City* yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2011-2016. Program andalan ini merupakan skala prioritas dalam memecahkan permasalahan utama yang dihadapi Kota Depok.

Cyber City adalah istilah untuk sebuah kota yang sudah memanfaatkan teknologi informasi untuk menjalankan pemerintahannya, sekaligus menyediakan akses ke jaringan dan infrastruktur berbasis internet untuk seluruh masyarakatnya.

Program *Cyber City* ini sangat penting dalam melaksanakan misi yang pertama dari Visi Kota Depok 2011-2016, yakni mewujudkan pelayanan publik yang profesional dalam teknologi informasi. Konsep *Depok Cyber City* bertujuan untuk mempermudah masyarakat Depok, mulai dari anak TK sampai ibu rumah tangga, mengakses informasi apa saja dan dari mana saja.

Untuk mengukur lancar dan tidaknya program atau kebijakan mencapai sasaran atau tujuan seperti yang diinginkan, *George Edward III* berpendapat ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Menurut *Edward III* (dalam *Subarsono, 2011: 90*), masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, “*without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*”. Ada empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *communication, resource, disposition or attitudes*, dan *bureaucratic structures*. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. *Resources* berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia (SDM). Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. *Disposition* berkenaan dengan kesediaan dari para implementator untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi

kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadi proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu bagian dari manajemen kebijakan publik secara umum. Implementasi kebijakan ini pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. (Nugroho, 2012: 675)

Program Unggulan *Depok Cyber City* merupakan bagian dari dinamika perkembangan teknologi komunikasi dan informatika yang sedemikian cepatnya. Mau tak mau Depok yang sudah berstatus sebagai sebuah kota, harus mengadopsi berbagai dinamisasi teknologi informasi tersebut, dimana penggunaan teknologi ini, melalui sistem jaringan global (*world wide networking*) seperti internet tak bisa dielakkan.

Teknologi berbasis internet (*internet based technology*) sudah menjadi “makanan” sehari-hari sebagian warga Kota Depok. Terlebih di “Kota Belimbing Dewa” ini terdapat komunitas akademik yang tersebar melalui hadirnya kampus-kampus berbasis teknologi internet.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada akhirnya menuju pada sebuah era yang disebut *cyber city*, dimana di dalamnya melibatkan *stakeholder* seperti pemerintah (*government*) sebagai fasilitator, publik (*citizen*) selaku pengguna layanan informasi dan komunikasi, serta komunitas (*bussines*)

selaku mitra pemerintah dalam melakukan berbagai terobosan dan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Implementasi kebijakan di bidang teknologi informasi dan komunikasi di dalam *cyber city* merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa, terutama pembangunan daerah. Peranan teknologi informasi dan komunikasi pada aktivitas pelayanan publik dewasa ini begitu pentingnya, sehingga teknologi tinggi ini telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan di berbagai sektor kehidupan dimana juga memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen seperti pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, lingkungan, UKM (Usaha Kecil Menengah), perhubungan dan perizinan.

Oleh karena itu, hal yang sangat penting untuk ditingkatkan adalah kemampuan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informatika dan komunikasi (TIK), mulai dari keterampilan dan pengetahuan, perencanaan, pengoperasian, perawatan dan pengawasan, serta peningkatan kemampuan TIK para pimpinan di lembaga pemerintahan, pendidikan, UKM (Usaha Kecil Menengah) dan komunitas TIK. Sehingga pada akhirnya akan dihasilkan *output* yang sangat bermanfaat baik bagi manusia sebagai individu itu sendiri maupun bagi semua sektor kehidupan.

A. Korelasi antara pemerintah (*government*), *business* (komunitas) dan *citizen* (publik) di dalam Implementasi *cyber city* antara lain :

1. *Government to Government* (Hubungan pemerintah dengan lembaga pemerintah)

- a. Menyediakan fasilitas jaringan interkoneksi antar lembaga pemerintah, untuk mempercepat pertukaran data
 - b. Menyediakan sistem aplikasi *e-government* untuk layanan masyarakat.
 - c. Menyediakan layanan *content* untuk layanan informasi bagi masyarakat.
2. *Government to bussines* (Hubungan pemerintah dengan komunitas)
- a. Melakukan kerjasama dengan berbagai komunitas TIK sebagai industri kreatif TIK untuk bersama-sama melakukan inovasi layanan masyarakat.
 - b. Pemerintah memberikan kesempatan dan peluang seluas-luasnya bagi komunitas TIK untuk pengembangan diri dan menciptakan produk-produk layanan publik berbasis TIK.
 - c. Pemerintah bersama komunitas TIK menumbuhkembangkan potensi daerah menuju masyarakat yang lebih maju dan meningkatkan daya saing kota depok.
3. *Government to citizen* (Hubungan pemerintah dengan masyarakat)
- a. Pemerintah menyediakan layanan informasi dan layanan pengaduan secara responsif bagi masyarakat, sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.
 - b. Pemerintah menyediakan aplikasi layanan publik berbasis TIK, seperti layanan kependudukan, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, sosial, lingkungan dan sektor lainnya.

B. *Cyber City* dalam Bidang Kependudukan

1. Penerapan KTP Nasional yang terintegrasi untuk menyukseskan program Nasional yaitu '*Single Identity*', layanan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran.
2. Kolaborasi dengan institusi vertikal dan lembaga, untuk menciptakan kemudahan interoperability dalam pertukaran data kependudukan, seperti puskesmas, rumah sakit, bank, sekolah, universitas, kantor imigrasi dan lain sebagainya.

C. *Cyber City* dalam Bidang Pendidikan

1. Pengayaan *content digital* berbasis pengetahuan untuk meningkatkan wawasan masyarakat yang mudah diakses melalui berbagai sarana seperti WiFi (Hotspot), telepon selular dan sarana komunikasi lainnya.
2. Penyediaan sistem 'Penerimaan Siswa Baru secara "*OnLine*" dan sistem informasi sekolah untuk kemudahan informasi bagi masyarakat terutama orangtua siswa.
3. Layanan pendidikan terbuka dengan cara belajar jarak jauh (*distance learning*) untuk memberikan kemudahan dalam bentuk diskusi/kelas *online*, konsultasi online dan pustaka digital.
4. Terjadi *sharing resource* (berbagi sumber daya, berbagi hasil penelitian) antar lembaga pendidikan /pelatihan, perpustakaan digital dan instrumen pendidikan lainnya.
5. Penggunaan perangkat informasi interaktif berbasis multimedia, seperti mata pelajaran berbasis multimedia yang secara bertahap menggantikan papan tulis, untuk memberikan kemudahan belajar bagi siswa.

D. *Cyber City* dalam Bidang Kesehatan

1. Kolaborasi dan integrasi dengan data kependudukan untuk memperoleh data warga tidak mampu, sebagai landasan untuk pemrosesan layanan jamkesda.
2. Tersedia interkoneksi dengan apotik dan rumah sakit untuk kemudahan layanan kesehatan dan obat-obatan.

E. *Cyber City* dalam bidang Tenaga Kerja dan Sosial

1. Menyediakan layanan tenaga kerja online yang terintegrasi dengan data kependudukan.
2. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat setempat dengan tersedianya pengetahuan kewirausahaan secara digital.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyebaran informasi publik, maka Diskominfo Kota Depok telah melakukan tugasnya terkait dengan sosialisasi dan penyebaran informasi tentang *Depok Cyber City*.

Jika melihat kebijakan publik dari perspektif *policy cycle* (siklus kebijakan), maka implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang sangat penting. Sebab, kebijakan tak hanya tampak baik di atas kertas, namun lebih penting lagi adalah implementasinya. Implementasi pun tak bisa secara otomatis berjalan tanpa digerakkan oleh para stakeholder yang berkomitmen untuk menjalankannya.

Implementasi kebijakan bukan sekadar menyangkut mekanisme penjabaran politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu. Studi implementasi pastilah akan memasuki

ranah permasalahan konflik, keputusan-keputusan yang pelik, dan isu mengenai siapa yang memperoleh apa, berapa banyak dari suatu kebijakan. Oleh karena itu, tak keliru jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan pakar kebijakan, Udoji (1981:32 dalam Wahab 2012: 126) dengan tegas mengatakan bahwa *“the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or print in file jackets unless they are implemented”* (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Implementasi kebijakan menjadi dasar bagi evaluasi kebijakan publik sehingga dapat diketahui kinerja suatu kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2012:674)

Misalnya, kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Keppres, Inpres, Kepmen, Perwali, adalah beberapa contoh kebijakan publik yang bisa langsung diimplementasikan.

Depok Cyber City adalah salah satu program Pemkot Depok yang merupakan turunan dari kebijakan yang termaktub dalam Peraturan Daerah

Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2011-2016.⁴ RPJMD ini adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun berdasarkan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, serta berpedoman pada RPJPD Kota Depok 2006-2025, dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013 dan RPJM Nasional 2009-2014. Hal itu sesuai dengan amanat UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

RPJMD Kota Depok 2011-2016 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan RPJPD Kota Depok dengan Visi : Terwujudnya Kota Depok yang Maju dan Sejahtera. Untuk mencapai visi tersebut, akan dilaksanakan 4 (empat) misi, yaitu Misi Pertama : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berbasis teknologi informasi; Misi Kedua : Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal; Misi Ketiga : Mewujudkan Infrastruktur dan lingkungan yang nyaman; Misi Keempat : Mewujudkan SDM unggul, kreatif dan religius.

Menurut Wahab (2004:63) terdapat tiga pihak yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan publik, yaitu pembuat kebijakan, pejabat/aparat pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran yaitu kepada siapa kebijakan tersebut ditujukan.

Ketiga pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan publik tersebut saling terkait dalam kelancaran implementasi kebijakan. Pembuat kebijakan

⁴ Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang RPJMD Kota Depok disahkan pada 23 September 2011. Program *Depok Cyber City* (DCC) tercantum dalam Bab VIII di bagian Program Andalan Daerah, dimana DCC menjadi 1 dari 4 program andalan Pemkot Depok.

seharusnya sudah mengetahui serta memahami bahwa kebijakan yang dibuatnya tidak akan menemui kendala saat diimplementasikan.

Pelaksana kebijakan akan meneruskan amanat dari pembuat kebijakan tersebut untuk mengeksekusinya menjadi terapan di lapangan. Kemudian kelompok sasaran dari kebijakan ini memberikan penilaian serta *feedback* atas pengimplementasinya. Selain mematuhi kebijakan tersebut, kelompok sasaran juga semestinya berani mengkritisi tingkat pelaksanaan dari kebijakan tersebut agar antara maksud dan implementasi kebijakan terintegrasi.

Seiring perjalanan waktu, program *Depok Cyber City* yang sudah mulai dijalankan sejak 2011 lalu masih belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan oleh berbagai faktor. Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, M. Fitriawan, yang ditemui peneliti pada 24 April 2014, mengatakan bahwa implementasi program tersebut masih belum optimal karena berbagai kendala seperti kesiapan dan ketersediaan SDM dan ketersediaan dana guna menyukseskan program ini. Meski demikian, menurutnya, secara bertahap pelaksanaan dari program tersebut terus berjalan secara bertahap, dengan berbagai perkembangannya seperti sudah tersedianya *Wifi hotspot* di seluruh kantor kelurahan se-Kota Depok. Fasilitas jaringan untuk akses internet gratis ini disediakan untuk pegawai kelurahan maupun warga demi mendapatkan informasi publik, khususnya di Kota Depok. Jaringan tersebut terpasang sejak Desember 2013.

Demikian pula di ruang-ruang publik seperti Jalan Margonda Raya dan

Taman Lembah Gurame, sudah terpasang jaringan *Wifi* yang bisa dinikmati warga secara cuma-cuma. Sementara, menurut Fitriawan, gedung *cyber* juga sedang dalam proses pembangunan. Ia mengakui bahwa untuk menyukseskan program *Depok Cyber City* perlu didukung dana yang besar, ibarat hendak membangun rumah, semakin besar dan mewah sebuah rumah yang akan dibangun, maka juga diperlukan dana yang tak sedikit. Demikian pula dengan salah satu program andalan Pemkot Depok ini juga jika ingin memperlengkapi fasilitas pendukungnya, maka diperlukan budget yang besar.

Pelaksanaan dari *Depok Cyber City* yang masih belum kurang maksimal juga dirasakan oleh pimpinan DPRD Kota Depok. Menurut Ketua DPRD Kota Depok, Rintis Yanto, selama ini program *cyber city* belum maksimal sehingga harus terus ditingkatkan. Ia juga menilai bahwa kinerja pemerintah dalam bidang komunikasi dan informatika masih terasa lambat perkembangannya dari tahun ke tahun. “Program Depok sebagai kota *cyber city* memang baik, tetapi aktualisasinya belum berjalan maksimal,” katanya.⁵

Dia juga belum melihat pemanfaatan teknologi informasi pada kerja-kerja pemerintahan, interkoneksi antarorganisasi perangkat daerah masih jauh dari harapan dan belum dapat dimanfaatkan dengan baik. Selain terkendala perangkat keras yang masih mahal, juga kurang siapnya perangkat daerah untuk menerima kehadiran teknologi informasi tersebut.

Penilaian dari ketua DPRD Kota Depok tersebut juga diakui oleh sejumlah warga Kota Depok yang ditemui peneliti. Bahkan, sebagian dari mereka belum

⁵Pernyataan tersebut dimuat pada surat kabar harian Monitor Depok, 6 Mei 2013.

pernah mendengar program *Depok Cyber City*. Padahal, jika ditinjau dari manfaat dan tujuan dari program *Depok Cyber City* sangatlah baik. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, ramah, dan prosedural.

Dilatarbelakangi oleh sejumlah fakta di atas, peneliti tertarik untuk mendalaminya melalui penelitian ini dengan mencari dan mendapatkan teori-teori yang dapat mengungkapkannya. Maka, sebuah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III tentang adanya 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik peneliti anggap dapat menggambarkan masalah yang mengemuka dalam penyebaran informasi publik mengenai *Depok Cyber City*. Keempat faktor tersebut adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Oleh karena itulah, kajian penelitian tesis ini berjudul, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Mengenai *Depok Cyber City* pada Diskominfo Kota Depok”.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Belum adanya sosialisasi/penyebaran informasi publik yang maksimal tentang *Depok Cyber City* kepada masyarakat.
2. Masih kurangnya kesiapan SDM di Diskominfo Kota Depok yang bersungguh-sungguh dalam mendukung keberhasilan .
3. Kurangnya dukungan dana dari Pemkot maupun Pemerintah Pusat dalam menyukseskan program *Depok Cyber City*

4. Masih lemahnya koordinasi antar-OPD dalam menyukseskan program *Depok Cyber City*.

1.3. Batasan Masalah

Dari sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam penyebaran informasi publik mengenai *Depok Cyber City*, maka penelitian ini dibatasi pada tiga aspek masalah utama, yaitu:

1. Implementasi kebijakan program andalan *Depok Cyber City* yang tertuang dalam Perda Nomor 13 Tahun 2011 dan dilaksanakan oleh Diskominfo Kota Depok.
2. Keterbatasan sumber daya dalam implementasi kebijakan penyebaran informasi publik mengenai *Depok Cyber City*.
3. Kesiapan pegawai Diskominfo dalam implementasi kebijakan penyebaran informasi publik mengenai *Depok Cyber City*.

1.4. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah, pertanyaan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi publik tentang *Depok Cyber City* pada Diskominfo Kota Depok. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang ingin diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah komunikasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi *Depok Cyber City*?

2. Apakah sumberdaya berpengaruh terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi *Depok Cyber City*?
3. Apakah disposisi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi *Depok Cyber City*?
4. Apakah struktur birokrasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi *Depok Cyber City*?
5. Apakah komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi secara simultan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi mengenai *Depok Cyber City*?

1.5. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah komunikasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi mengenai *Depok Cyber City*.
2. Untuk mengetahui apakah sumberdaya berpengaruh terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi mengenai *Depok Cyber City*.
3. Untuk mengetahui apakah disposisi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi mengenai *Depok Cyber City*.
4. Untuk mengetahui apakah struktur birokrasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi mengenai *Depok Cyber City*.

5. Untuk mengetahui apakah komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi secara simultan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi mengenai *Depok Cyber City*.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kota Depok, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagai masukan untuk memperbaiki implementasi, serta menentukan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.
2. Bagi ilmu pengetahuan, dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam khasanah ilmu pengetahuan, terutama di bidang Administrasi Publik.
3. Bagi peneliti yang lain agar hasil penelitian ini dapat digunakan dalam penelitian tentang implementasi kebijakan lebih lanjut.
4. Bagi peneliti sendiri penelitian ini dapat menjadi sarana implementasi ilmu Administrasi Publik yang selama 1,5 semester peneliti dapatkan dalam ruang kuliah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Kebijakan Publik

2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Sebagai sebuah kajian ilmiah, penelitian tentang kebijakan publik tak bisa dilepaskan dari teori-teori yang mendasarinya. Teori-teori ini dipergunakan untuk memotret sebuah fenomena sosial yang muncul di masyarakat kita. Sebab suatu teori dianggap relevan dengan fenomena yang muncul dan terus berkembang tersebut.

Secara teoretik, ada sejumlah teori yang dikemukakan oleh para ahli di bidang kajian ini. Kata “kebijakan” merupakan terjemahan dari *policy* yang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah karena pemerintahlah yang memiliki wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab untuk melayani kepentingan umum (Abidin, 2012: 3)

Sedangkan secara etimologis, *policy* berasal dari kata “*polis*” dalam bahasa Yunani yang berarti negara-kota. Dalam bahasa Latin, kata ini berubah menjadi “*politia*” yang berarti negara. Masuk dalam bahasa Inggris lama (*the middle English*), kata tersebut menjadi “*policie*” yang pengertiannya berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintah (Dunn, 2003: 7).

Uniknya, dalam bahasa Indonesia kata kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* tersebut mempunyai konotasi tersendiri. Kata

tersebut mempunyai akar kata bijaksana atau bijak yang dapat disamakan dengan pengertian *wisdom* yang berasal dari kata sifat *wise* dalam bahasa Inggris.

Melalui pengertian ini, sifat bijaksana dibedakan orang dengan sekadar pintar (*clever*) atau cerdas (*smart*). Pintar dapat berarti ahli dalam satu bidang ilmu, sedangkan cerdas biasanya diartikan sebagai sifat seseorang yang dapat berpikir cepat atau dapat menemukan jawaban terhadap suatu persoalan yang dihadapi dengan cepat (Abidin, 2012: 4)

Sementara pengertian publik dalam rangkaian kata *public policy* memiliki tiga konotasi, yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum. Hal ini dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek, dan lingkungan dari kebijakan. Dalam dimensi subjek, kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah, sehingga salah satu ciri kebijakan adalah “*what government do or not to do*”. Kebijakan dari pemerintahlah yang dapat dianggap sebagai kebijakan yang resmi, sehingga mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi (Abidin, 2012: 7)

Thomas R. Dye, dalam Miftah Thoha (2011: 107) mengemukakan *public policy* atau kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan (*whatever government choose to do or not to do*). Dalam pengertian seperti ini, maka pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk juga apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah.

David Easton, dalam Miftah Thoha (2011: 107) merumuskan kebijakan publik sebagai, “*the uthoritative allocation of value for the whole society, but it*

turns out that only the government can authoritatively act on the 'whole' society, and everything the government choosed to do or not to do results in the allocation of values.” (alokasi otoritatif nilai bagi seluruh masyarakat, tetapi ternyata bahwa hanya pemerintah otoritatif dapat bertindak pada 'seluruh' masyarakat, dan semuanya pemerintah dipilih untuk melakukan atau tidak melakukan hasil dalam alokasi nilai-nilai).

2.1.2. Tipe-tipe Model Kebijakan

Model kebijakan (*policy models*), menurut Saul I. Gass dan Roger (dalam Dunn, 2003: 232) adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Persis seperti masalah-masalah kebijakan yang merupakan bangunan mental yang berdasarkan pada konseptualisasi dan spesifikasi elemen-elemen kondisi masalah, model-model kebijakan merupakan rekonstruksi artifisial dari realitas dalam wilayah yang merentang dari energi dan lingkungan sampai ke kemiskinan, kesejahteraan, dan kejahatan.

Model kebijakan dapat dinyatakan sebagai konsep, diagram, grafik, atau persamaan matematika. Ini dapat digunakan tidak hanya untuk menerangkan, menjelaskan, dan memprediksikan elemen-elemen suatu kondisi masalah, melainkan juga untuk memperbaikinya dengan merekomendasikan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah-masalah tertentu.

Menurut *Dunn* (2003: 233) model-model kebijakan dapat membantu membedakan hal-hal yang esensial dan yang tidak esensial dari suatu masalah,

mempertegas hubungan di antara faktor-faktor atau variabel-variabel penting, dan membantu menjelaskan dan memprediksikan konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan.

Beberapa kriteria yang dapat dipergunakan untuk menilai kegunaan model, sebagaimana dikembangkan oleh Thomas Dye antara lain (Wahab, 2012: 156):

Pertama, apakah model itu meruntutkan dan menyederhanakan kehidupan politik sedemikian rupa sehingga kita bisa memikirkannya secara lebih jernih dan memahami antar hubungannya dalam dunia nyata? Jika model itu terlampau sederhana sehingga kita malah salah dalam memahami realita, atau jika model itu terlampau kompleks sehingga membuat kita bingung, maka model itu kemungkinan tidak banyak membantu dalam menjelaskan kebijakan publik.

Kedua, apakah model itu mengidentifikasi aspek-aspek terpenting dari kebijakan publik? Model tersebut harus memfokuskan diri pada aspek-aspek yang paling penting dari suatu gejala politik, semisal sebab-sebab atau akibat-akibat dari kebijakan publik, dan tidak terlalu asyik dengan sejumlah variabel atau kondisi yang tidak relevan. Intinya, model itu harus mampu mengarahkan perhatian kita pada hal-hal yang paling penting mengenai kebijakan publik.

Ketiga, apakah model itu sesuai dengan realita? Artinya, apakah model tersebut menunjukkan hubungan yang kuat dengan realita, atautkah ia terlampau ideal atau terlampau abstrak sehingga sama sekali tidak terkait dengan dunia nyata? Sebuah model yang baik harus mengaitkan diri dengan dunia nyata sebagai

referensi empirisnya dan mempermudah perolehan pemahaman yang mendalam atas situasi atau proses kebijakan yang ada.

Keempat, apakah model itu mengkomunikasikan sesuatu yang betul-betul bermakna sedemikian rupa sehingga semua orang mengerti? Apakah model tersebut bercirikan kesepahaman antarsubjek, dimana konsep tertentu yang termuat dalam model itu adalah sesuatu yang betul-betul dipahami oleh semua orang? Jika model itu ternyata mengkomunikasikan sebuah konsep yang tidak melahirkan pengertian bersama, maka model itu dapat dinilai sebagai hanya memiliki tingkat kesepahaman yang sedikit, dan karena itu tidak membantu kita dalam memahami gejala politik (kebijakan publik).

Kelima, apakah model itu langsung mengarahkan kita pada penyelidikan dan penelitian kebijakan publik? Sebuah model (kuantitatif) yang baik seyogianya menyarankan sejumlah hubungan yang dapat diuji (berupa hipotesis yang dapat diobservasi, diukur, dan diverifikasi. Kita harus dapat menerapkan model itu sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengujian secara empiris. Model itu sedikit kegunaannya kalau tidak memuat proposisi-proposisi yang dapat diuji atau jika hubungan-hubungannya satu sama lain tidak bisa diukur dan diuji dengan data yang berasal dari dunia nyata.

Keenam, apakah model itu menyodorkan penjelasan tertentu mengenai kebijakan publik? Sebuah model yang mendeskripsikan kebijakan publik tentu kurang berguna bila dibandingkan dengan model yang mampu menjelaskan bagaimana dan mengapa kebijakan publik itu. Apakah model tersebut menyodorkan sejumlah hubungan antarvariabel yang dapat diuji sehingga dapat

dipakai untuk menjelaskan secara agak lengkap mengenai fenomena kebijakan publik?

Model dengan demikian tersebut digunakan untuk sebuah akurasi pengelolaan kebijakan. Aktor atau implementator harus memahami model ini agar dapat berhasil dalam merumuskan kebijakan.

2.1.3. Implementasi Kebijakan Publik

Sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan tak jarang bertolak belakang dengan apa yang diharapkan. Bahkan, jika tak dilakukan secara hati-hati alias ceroboh, maka dalam implementasinya akan jadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.

Oleh karena itu, sebelum diimplementasikan, sebuah kebijakan publik harus melalui proses perencanaan hingga menjadi rumusan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan teori/konsep dan kondisi obyektif masyarakat. Tahapan implementasi karena menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2012:674)

Hal itu juga sejalan dengan pemikiran Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2006:65) yang mengartikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Djadja Saefullah (dalam Arifin, 2011: 83) menyatakan bahwa studi kebijakan publik dapat dipahami dari dua perspektif, yakni; Pertama, perspektif politik, bahwa kebijakan publik di dalamnya perumusan, implementasi, maupun evaluasinya pada hakekatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik di dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya (*resources*) sesuai dengan visi, harapan dan prioritas yang ingin diwujudkan.

Kedua, perspektif administratif, bahwa kebijakan publik merupakan ikhwal berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik (*official officers*) di dalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan di dalam realitas. Memahami kebijakan publik dari kedua perspektif tersebut secara berimbang dan menyeluruh akan membantu kita lebih mengerti dan maklum mengapa suatu kebijakan publik tersebut meski telah dirumuskan dengan baik namun dalam implementasinya sulit terwujud.

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Widodo, 2010: 87) menjelaskan makna implementasi kebijakan yaitu memahami apa yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman demikian meliputi usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Anderson (dalam Arifin, 2011: 89) menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi,
2. Hakikat proses administrasi,
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan
4. Efek atau dampak dari implementasi.

Pandangan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencapai apa yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan keputusan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan dengan begitu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian tidak dilaksanakan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Sedangkan dalam prosesnya, implementasi kebijakan publik baru bisa dijalankan jika tujuan-tujuan dari kebijakan tersebut telah ditetapkan, program-program telah dibuat, serta dananya telah dialokasikan untuk mencapai tujuannya.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli kebijakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan tahap dalam proses kebijakan publik yang diharapkan mencapai tujuan yang telah digariskan.

2.1.4. Model Implementasi Kebijakan Publik

2.1.4.1. Model George C. Edwards III

George C. Edwards III menilai implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan

mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edwards menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:

- 1) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
- 2) Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Menurut Edwards (dalam Widodo, 2011: 96-110), ada setidaknya 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam implementasi kebijakan. Keempat faktor itu adalah: komunikasi (*communication*), sumber daya manusia (*resource*), sikap (*disposition*), dan struktur birokrasi (*beureucratic structure*). Keempat faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Komunikasi (*communication*)

Komunikasi mengandung makna bersama-sama (*common*). Istilah ini berasal dari bahasa Latin, yaitu *communicatio* yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifatnya *communis* yang bermakna umum atau bersama-sama. Para ahli mendefinisikan komunikasi menurut sudut pandang mereka masing-masing.

Hoveland mendefinisikan komunikasi adalah proses dimana individu mentransmisikan stimulus untuk mengubah perilaku individu yang lain. Everett M. Rogers dan Lawrence Kincaid menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran

informasi antara satu sama lain, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Sedangkan komunikasi menurut Sannon dan Weaver adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi verbal, tapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi (Wiryanto, 2006: 6-7)

Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2010: 97). Widodo menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (transmisi), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak

menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

b. Sumberdaya (*resources*)

1. Sumber Daya Manusia (*human resources*)

Tanpa dukungan sumberdaya (manusia) yang cukup, baik secara kuantitas maupun kualitasnya, maka sebuah implementasi kebijakan tidak akan berhasil terlaksana dan tercapai tujuannya. Kualitas SDM menyangkut keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidang yang digelutinya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah SDM, apakah sudah mencukupi seluruh kelompok sasaran dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan.

SDM begitu berpengaruh pada keberhasilan suatu implementasi kebijakan, sebab tanpa SDM yang andal implementasi kebijakan hanya akan menemui kegagalan.

2. Anggaran (*Budgetary*)

Anggaran diperlukan mengimplementasikan kebijakan. Ini demi menjamin terlaksananya suatu kebijakan publik karena tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Fasilitas (*facility*)

Fasilitas menyangkut sarana dan prasarana yang merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan. Tersedianya fasilitas yang layak seperti gedung, tanah, dan peralatan perkantoran

dan penunjang lainnya akan mendukung keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4. Informasi dan kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting, terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

5 Kompetensi

Kompetensi merujuk pada kinerja seseorang dalam suatu pekerjaan yang bisa dilihat dari pikiran, sikap, dan perilaku. Spencer & Spencer (dalam Hamzah B. Uno, 2007: 63), menyatakan bahwa kompetensi merupakan karakteristik yang menonjol dari seseorang dan menjadi cara-cara berperilaku dan berfikir dalam segala situasi, serta berlangsung dalam periode waktu yang lama. Lebih lanjut Spencer membagi lima karakteristik kompetensi yaitu sebagai berikut:

- 1) Motif, yaitu sesuatu yang orang pikirkan dan inginkan yang menyebabkan sesuatu.
- 2) Sifat, yaitu karakteristik fisik tanggapan konsisten terhadap situasi.
- 3) Konsep diri, yaitu sikap, nilai, dan imej dari seseorang.
- 4) Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu.
- 5) Keterampilan, yaitu kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan fisik dan mental.

c. Disposisi (*disposition*)

Disposisi yang dimaksudkan Edwards III adalah sikap, yakni para pelaksana kebijakan, yang sangat berperan dalam upaya keberhasilan implementasi kebijakan sehingga sesuai dengan dengan tujuan. Misalnya sikap jujur, komitmen, dan bertanggung jawab, harus dimiliki mereka. Sikap seperti ini akan dapat mengarahkan implementor tetap berada dalam *track* program yang telah digariskan. Tanggung jawab dan komitmen pelaksana juga akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Azwar (1995:6), menggolongkan definisi sikap dalam tiga kerangka pemikiran. Pertama, kerangka pemikiran yang diwakili oleh para ahli psikologi seperti Louis Thurstone, Rensis Likert dan Charles Osgood. Menurut mereka sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut.

Kedua, kerangka pemikiran ini diwakili oleh ahli seperti Chave, Bogardus, LaPierre, Mead dan Gordon Allport. Menurut kelompok pemikiran ini sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kesiapan yang dimaksud merupakan kecenderungan yang potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respons .

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik, maka

dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)

Struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan Max Weber mengenai organisasi formal, memiliki sepuluh ciri, yaitu: 1). Terdiri dari hubungan-hubungan yang ditetapkan antara jabatan-jabatan. 2). Tujuan atau rencana organisasi yang terbagi ke dalam tugas-tugas. 3). Kewenangan untuk melaksanakan kewajiban diberikan kepada jabatan. 4). Garis-garis kewenangan dan jabatan diatur menurut suatu tatanan hierarkis. 5) Suatu sistem aturan dan regulasi yang umum tetapi tegas, yang ditetapkan secara formal, mengatur tindakan-tindakan dan fungsi-fungsi jabatan dalam organisasi. 6). Prosedur dalam organisasi bersifat formal dan impersonal, yakni peraturan-peraturan organisasi berlaku bagi setiap orang. 7). Suatu sikap dan prosedur untuk menerapkan suatu sistem disiplin sebagai bagian dari organisasi. 8). Anggota organisasi harus memisahkan kehidupan pribadi dan organisasi. 9) Pegawai dipilih untuk bekerja dalam organisasi berdasarkan teknis, dan 10). Meski pekerjaan dalam birokrasi berdasarkan kecakapan teknis, namun kenaikan jabatan dilakukan berdasarkan senioritas dan prestasi kerja. (Pace & Faules, 2006: 45-47).

Dari teori teori organisasi birokrasi yang dikemukakan Weber di atas dapat ditarik pemahaman bahwa struktur birokrasi memiliki tugas-tugas rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas

yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, dan pengambilan keputusan mengikuti arahan komando.

Struktur organisasi birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal, yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri.

Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

2.1.4.2. Model *Donald Van Meter* dan *Carel Van Horn*

Van Meter dan Van Horn (dalam Wibawa et. al., 1994:19), “Merumuskan sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan antar berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan.” Selanjutnya Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2005:99) mengemukakan ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni : 1) Standar dan sasaran kebijakan, 2) Sumberdaya, 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, 4) Karakteristik agen pelaksana, 5) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, 6) Sikap para pelaksana.

2.1.4.3. Model Merilee S. Grindle

Grindle (dalam Wibawa, 1994:127) mengemukakan teori implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Dalam teori ini *Grindle* memandang bahwa suatu implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Dalam teorinya itu Grindle mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut.

Isi kebijakan menurut Grindle mencakup: 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan, 3) Derajat perubahan yang diinginkan, 4) Kedudukan pembuat kebijakan, 5) Siapa pelaksana program, 6) Sumber daya yang dikerahkan.

2.1.4.4. Model David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Pandangan David L. Weimer dan Aidan R. Vining (dalam Subarsono, 2005:103) yang mengemukakan ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni: 1) Logika kebijakan, 2) Lingkungan tempat kebijakan dioperasionalkan, dan 3) Kemampuan implementator kebijakan.

Tiga kelompok di atas masing-masing logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dan kemampuan implementor kebijakan harus senantiasa menjadi fokus perhatian dari pengambil kebijakan.

2.1.4.5. Model Charles O. Jones

Jones (1996 : 166) mengatakan bahwa: Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan. Menurut Jones ketiga aktivitas tersebut dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Tiga aktivitas dimaksud adalah :

- 1) Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan,
- 2) Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan
- 3) Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

a. Model Deskriptif

Model ini digunakan untuk memantau hasil-hasil dari aksi-aksi kebijakan maupun untuk meramalkan kinerja ekonomi. Sebagai contoh, Kementerian Keuangan mempersiapkan ramalan ekonomi tahunan untuk dimasukkan dalam laporan ke legislatif maupun eksekutif (Presiden).

b. Model Normatif

Tujuan model ini bukan hanya untuk menjelaskan dan/atau memprediksi tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa nilai. Di antara beberapa jenis model normatif yang digunakan oleh para analis kebijakan adalah model normatif yang membantu menentukan tingkat kapasitas pelayanan yang optimum, waktu pelayanan dan perbaikan yang

optimum, pengaturan volume dan waktu yang optimum dan keuntungan yang optimum pada investasi publik.

Masalah-masalah keputusan normatif biasanya dalam bentuk: mencari nilai-nilai variabel yang terkontrol (kebijakan) yang akan menghasilkan manfaat yang terbesar (nilai), sebagaimana terukur dalam variabel keluaran yang hendak diubah oleh para pembuat kebijakan.

c. Model Verbal

Model normatif dan deskriptif dapat diekspresikan di dalam tiga bentuk utama, yaitu: verbal, simbol, dan prosedural. Model verbal diekspresikan dalam bahasa sehari-hari, bukannya bahasa logika simblolis dan matematika. Dalam menggunakan model verbal, analisis bersandar pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi.

Penilaian nalar menghasilkan argumen kebijakan, bukannya dalam bentuk nilai-nilai angka pasti. Model verbal secara relatif mudah dikomunikasikan di antara para ahli dan orang awam, dan biayanya murah. Keterbatasan model verbal adalah bahwa masalah-masalah yang dipakai untuk memberikan prediksi dan rekomendasi bersifat implisit atau tersembunyi, sehingga sulit untuk memahami dan memeriksa secara kritis argumen-argumen tersebut sebagai keseluruhan.

d. Model Simbolis

Model ini menggunakan simbol-simbol matematis untuk menerangkan hubungan di antara variabel-variabel kunci yang dipercaya mencirikan suatu masalah. Prediksi atau solusi yang optimal diperoleh dari model-model simbolis dengan meminjam metode-metode matematika, statistika, dan logika.

Model-model simbolis sulit untuk dikomunikasikan di antara orang awam, termasuk para pembuat kebijakan, dan bahkan di antara para ahli pembuat model sering terjadi kesalahpahaman tentang elemen-elemen dasar dari model.

e. Model Prosedural

Model prosedural menampilkan hubungan yang dinamis di antara variabel-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan. Prediksi-prediksi dan solusi-solusi optimal diperoleh dengan mensimulasikan dan meneliti seperangkat hubungan yang mungkin, sebagai contoh pertumbuhan ekonomi, konsumsi energi, dan suplai makanan dalam tahun-tahun mendatang, yang tidak dapat diterangkan secara baik karena data-data yang diperlukan tidak tersedia. Prosedur simulasi dan penelitian pada umumnya (meskipun tidak harus) diperoleh dengan bantuan sebuah komputer, yang diprogram untuk menghasilkan prediksi-prediksi alternatif di bawah serangkaian asumsi yang berbeda-beda.

2.2. Depok Cyber City

Pemerintah Kota Depok dalam periode kedua kepemimpinan Walikota Nur Mahmudi Ismail terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada warga yang dipimpinnya (*public services*). Salah satu pelayanan publik yang mendapatkan perhatian Pemkot adalah layanan kemudahan dan kecepatan akses informasi. Demi mengoptimalkan dan mencapai target yang telah direncanakan dalam membangun kota yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota ini, Nur Mahmudi telah mencanangkan Depok sebagai *Cyber City*.

Istilah *cyber* bukanlah kata asing bagi kebanyakan orang dewasa ini, terlebih warga yang tinggal di daerah yang sudah berstatus sebagai “kota” seperti Depok. Kata ini lazim dipergunakan untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya (*virtual*). Kata ini pun erat kaitannya dengan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) yang juga tak terlepas dari piranti berteknologi canggih (*high technology*) seperti komputer, baik personal computer (PC), laptop/*notebook*, maupun *smart phone*.

Sebuah kota yang sudah memanfaatkan teknologi informasi untuk menjalankan pemerintahannya dan sekaligus menyediakan akses ke jaringan dan infrastruktur berbasis internet untuk seluruh masyarakatnya biasa disebut sebagai *Cyber City*. Dengan demikian, istilah *Cyber City* dapat diartikan sebagai kota maya atau kota yang sebagian atau semua warganya sudah “*internet minded*”. Kota yang sudah menerapkan konsep *Cyber City* adalah kota yang menjadikan aktivitas pelayanan publiknya terkoneksi dan terintegrasi di seluruh bidang kehidupan masyarakat.

Melalui kemajuan teknologi informatika dan komunikasi itulah Pemkot Depok telah mulai menerapkan konsep *Cyber City* sejak 2012. Pemkot di sini telah memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang informatika dan komunikasi tersebut guna menjalankan pemerintahan dan melayani masyarakat serta kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan.

Terkait dengan proyek *Cyber City*, dalam misi pembangunan Kota Depok 2011–2016 tercantum rincian sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berbasis teknologi informasi;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal;
3. Mewujudkan Infrastruktur dan lingkungan yang nyaman;
4. Mewujudkan SDM unggul, kreatif dan religius.

Sedangkan beberapa tujuan dan sasaran pada misi mewujudkan “pelayanan publik yang profesional, berbasis teknologi informasi”, memiliki tujuan:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; yaitu dengan meningkatnya pelayanan yang efisien, efektif dan transparan.
- b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan; meningkatnya tertib administrasi kependudukan; meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat; dan meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana.

Program *Cyber City* ini sangat penting dalam melaksanakan misi yang pertama dari visi Kota Depok 2011-2016, yakni mewujudkan pelayanan publik yang profesional dalam teknologi informasi. Contoh pelayanan publik yang dapat dilakukan secara online misalnya dalam pembuatan KTP, dimana dengan menggunakan sistem *online* secara terpadu dapat memangkas berbagai birokrasi yang berbelit-belit dan tidak perlu membuang waktu dan biaya yang tidak perlu.

Program Depok *Cyber City* melibatkan tiga elemen, yaitu pertama, Pemerintah (*local government*) sebagai fasilitator dalam penerapan teknologi informasi. Kedua, sektor publik (*citizen*) sebagai pengguna layanan informasi dan komunikasi. Dan ketiga, sektor komunitas (*business*) sebagai mitra Pemerintah dalam melakukan berbagai inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Hubungan Pemerintah dengan lembaga Pemerintah dapat berupa penyediaan fasilitas jaringan interkoneksi antar lembaga Pemerintah untuk mempercepat pertukaran data. Kemudian penyediaan sistem aplikasi *e-government* dimana segala pemerintahan akan berbasis internet untuk layanan masyarakat serta menyediakan layanan content untuk layanan informasi bagi masyarakat. Sementara itu, hubungan Pemerintah dengan komunitas yakni melakukan kerjasama dengan berbagai komunitas Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sebagai industri kreatif TIK untuk bersama-sama melakukan inovasi layanan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah memberikan kesempatan dan peluang seluas-luasnya bagi komunitas TIK untuk pengembangan diri dan menciptakan produk-produk layanan publik berbasis TIK.

Pemerintah bersama komunitas TIK dapat menumbuhkembangkan potensi daerah menuju masyarakat yang lebih maju dan meningkatkan daya saing Kota Depok. Untuk hubungan Pemerintah dengan masyarakat berupa penyediaan layanan informasi dan layanan pengaduan secara responsif bagi masyarakat. Hal Ini sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik. Selanjutnya pemerintah juga menyediakan aplikasi layanan publik berbasis TIK, seperti layanan

kependudukan, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, sosial, lingkungan dan sektor lainnya.

Program *Depok Cyber City* ditujukan untuk melayani informasi di berbagai bidang di Kota Depok, antara lain bidang kependudukan seperti penerapan KTP Elektronik Nasional (e-KTP), Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran, serta kolaborasi dengan institusi vertikal dan lembaga untuk memudahkan pertukaran data kependudukan seperti puskesmas, rumah sakit, sekolah, dan universitas. Pembuatan KTP yang bisa dilakukan secara online, misalnya, dapat memangkas berbagai birokrasi yang berbelit-belit dan tidak perlu memakan waktu dan biaya yang cukup banyak.

Di bidang pendidikan, Pemkot Depok merencanakan pengayaan *content digital* yang berbasis ilmu pengetahuan seperti fasilitas *WiFi (hotspot)*, telepon selular, dan sarana komunikasi lainnya. Untuk hubungan Pemerintah dengan masyarakat *cyber city* berupa penyediaan layanan informasi dan layanan pengaduan secara responsif bagi masyarakat. Ini sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik. Pemkot juga menyediakan aplikasi layanan publik berbasis TIK, seperti layanan kependudukan, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, sosial, lingkungan dan sektor lainnya.

Dengan percepatan program *Depok Cyber City* diharapkan transparansi informasi dan peningkatan partisipasi publik akan pelayanan publik lebih baik. Selain itu pencegahan kasus korupsi dan kolusi diharapkan bisa lebih efektif dan efisien.

2.3. Penyebaran Informasi Publik

Penyebaran informasi publik terkait dengan isu demokratisasi, dimana keterbukaan informasi publik menjadi bagian yang inheren. Tujuan utama keterbukaan informasi di setiap negara adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik (Bolton, 1996).⁶

Mendel (2004)⁷ menyatakan bahwa membuka akses informasi merupakan kewajiban bagi pemerintah dan badan publik. Secara fundamental, sebuah informasi adalah milik publik, bukan milik pemerintah atau badan publik. Akan tetapi pemerintah memang harus menjaga keseimbangan antara menutup informasi dan kepentingan publik. Namun, bagaimanapun, kepentingan publik tetap harus didahulukan.

Di Indonesia setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Juga hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, dijamin oleh undang-undang. Pernyataan tersebut tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28.

Seiring dengan berkembangnya era reformasi yang mendukung keterbukaan di segala bidang, maka berbagai tuntutan dari elemen masyarakat akan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) makin kuat. *Good governance* tersebut mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi serta

⁶ Dikutip dari artikel M. Taufik, "Peluang Kajian Keterbukaan Informasi Publik", lihat di <http://www.rumakom.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 2 April 2014.

⁷ *Ibid.*

partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Hal inilah yang melahirkan peraturan perundang-undangan baru yaitu UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Sejak 2010 seluruh badan publik, khususnya lembaga negara yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, berkewajiban menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon atau pengguna informasi publik. Pada bagian konsideran menimbang UU tersebut, dinyatakan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (Budiman, 2011: 1)

Oleh karena itu, sesuai ketentuan dalam regulasi tersebut kini setiap badan dan lembaga publik berkewajiban menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan (proporsional), dan cara sederhana, adanya pengecualian informasi bersifat ketat dan terbatas, serta kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Sosialisasi mengenai hal tersebut juga dilakukan melalui penyebaran informasi publik. Keterbukaan informasi publik yang disertai penyebaran informasi publik dalam konteks good governance diharapkan mampu menghadirkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses

pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan.

2.4. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Winda Paramita (UI, 2012) berjudul: “Analisis Faktor Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi pada Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya dan Cianjur”. Penelitian tersebut menggunakan paradigma positivis dengan metode perpaduan (*mix*) kuantitatif dan kualitatif. Model yang digunakan berasal dari George C. Edwards III tentang 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semua 4 faktor itu masih berkategori sedang, yakni perlu ditingkatkan agar lebih maksimal dan efektif sehingga dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk lebih mandiri dalam penanggulangan bencana bidang pendidikan.

Eko Slamet Riyanto dalam penelitiannya: “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Melalui Forum Tatap Muka di Badan Informasi Publik Kominfo” (UI, 2010), berusaha mengukur dapat tidaknya kebijakan mencapai sasaran atau tujuan dengan menggunakan model implementasi kebijakan George Edwards III tentang 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan

pendekatan positivis deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyebaran publik melalui forum tatap muka sudah cukup berhasil.

Kunto Hamidjoyo melakukan penelitian tesis pada Universitas Diponegoro (2004) berjudul: “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan, Pembinaan, dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surakarta (Studi Kasus di Kecamatan Laweyan)”. Penelitian tersebut mengkaji tentang keberhasilan implementasi kebijakan Perda Nomor 8 Tahun 1995 Pemkot Surakarta dengan studi kasus di Kecamatan Laweyan dengan menggunakan pendekatan positivis deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara kondisi lingkungan, komunikasi, dan perilaku pelaksana dengan keberhasilan implementasi kebijakan Perda Nomor 8 tersebut sebesar 66,22%, sedangkan kondisi lingkungan menyumbang sebesar 33,78% ditentukan oleh variabel lain. Dari uji determinasi 66,22% tersebut, kondisi lingkungan menyumbang 25%, komunikasi menyumbang 53%, dan perilaku pelaksana menyumbang 22%.

Ketiga penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini lebih lanjut dapat digambarkan melalui matriks di bawah ini:

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Aspek	Winda Paramita (tesis, UI, 2012)	Eko Slamet Riyanto (tesis, UI, 2010)	Kunto Hamidjoyo (tesis, Undip, 2004)
Judul	Analisis Faktor Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi pada Implementasi	“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran	“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan

	Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya dan Cianjur”	Informasi Publik Melalui Forum Tatap Muka di Badan Informasi Publik Kominfo”	Penataan, Pembinaan, dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surakarta (Studi Kasus di Kecamatan Laweyan)”
Aspek	Winda Paramita (tesis, UI, 2012)	Eko Slamet Riyanto (tesis, UI, 2010)	Kunto Hamidjoyo (tesis, Undip, 2004)
Latar belakang	Munculnya kebijakan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan, khususnya di Kab. Tasikmalaya dan Kab. Cianjur menjadi menarik untuk diteliti.	Pembentukan Badan Informasi Publik yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara yang menyebutkan bahwa BIP mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi publik.	Terbitnya Perda No.8 Tahun 1995 tentang Penataan, Pembinaan, dan Penertiban PKL di Kota Surakarta menjadi ujian bagi Pemkot untuk menerapkan implementasi kebijakan tersebut di Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.
Tujuan	Untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang	Untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui program	Untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi Perda Nomor 8 Tahun 1995 khususnya bagi PKL di

	pendidikan, terutama di kalangan tenaga pendidik (guru) di kedua kabupaten.	tatap muka yang dilakukan Kementerian Kominfo.	Kecamatan Laweyan.
Aspek	Winda Paramita (tesis, UI, 2012)	Eko Slamet Riyanto (tesis, UI, 2010)	Kunto Hamidjoyo (tesis, Undip, 2004)
Instrumen penelitian	Kuesioner, wawancara, dokumentasi	Kuesioner, wawancara, dokumentasi	Kuesioner, wawancara, dan dokumentasi
Teori yang digunakan	George C. Edwards III	George C. Edwards III	Van Meter & Van Horn, George C. Edwards III
Hasil penelitian	Semua dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi masih berkategori sedang (pengaruhnya). Sehingga keempat faktor itu harus ditingkatkan agar implementasinya lebih maksimal dan efektif.	Dari keempat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, faktor komunikasi, sumberdaya, dan disposisi secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan. Sedangkan struktur birokrasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan.	Ada pengaruh yang signifikan antara kondisi lingkungan, komunikasi, dan perilaku pelaksana, dengan keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang berbagai hal yang terkait dengan metode penelitian, antara lain: pendekatan penelitian, kerangka penelitian, obyek dan lokasi penelitian, metode pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, teknik analisis data. Metode demikian dipergunakan untuk melakukan penelitian dan analisis terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi publik tentang oleh Satuan Kerja (Satker) Diskominfo Kota Depok tentang Depok *Cyber City*.

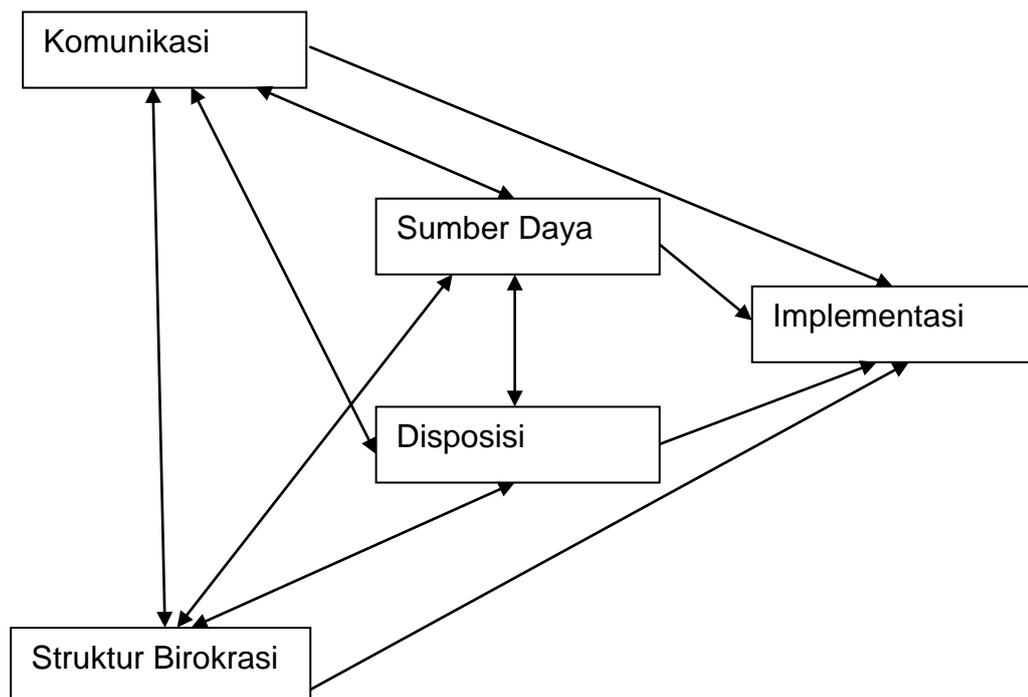
3.1. Kerangka Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan hipotesis penelitian, maka penelitian ini di desain untuk melakukan penelitian kausal yaitu untuk menganalisis hubungan-hubungan atau pengaruh-pengaruh antara empat variabel bebas dengan satu variabel terikat atau bagaimana suatu variabel bebas mempengaruhi variable terikat, baik secara parsial maupun secara bersama-sama.

Sifat pengaruh yang terjadi di antara variable-variabel tersebut, apakah terdapat pengaruh secara simetris atau asimetris. Pengaruh simetris apabila keempat variabel bebas X1, X2, X3 dan X4 saling berfluktuasi secara parsial maupun bersama sama terhadap Y. Jika demikian maka dianggap tidak terdapat pengaruh.

Pengaruh asimetris terjadi jika variable bebas X1, X2, X3, dan X4, baik secara parsial maupun secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat Y. Pengaruh tersebut merupakan pengaruh kausal. Pengaruh timbal balik apabila keempat variabel bebas yaitu X1, X2, X3, dan X4 baik secara parsial maupun secara bersama-sama saling mempengaruhi dan saling memperkuat, atau saling memperlemah Y. berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penelitian ini merupakan penelitian kausal dengan sifat pengaruh asimetris.

Berikut ini merupakan bagan faktor-faktor pengaruh implementasi kebijakan publik model George Edwards III :

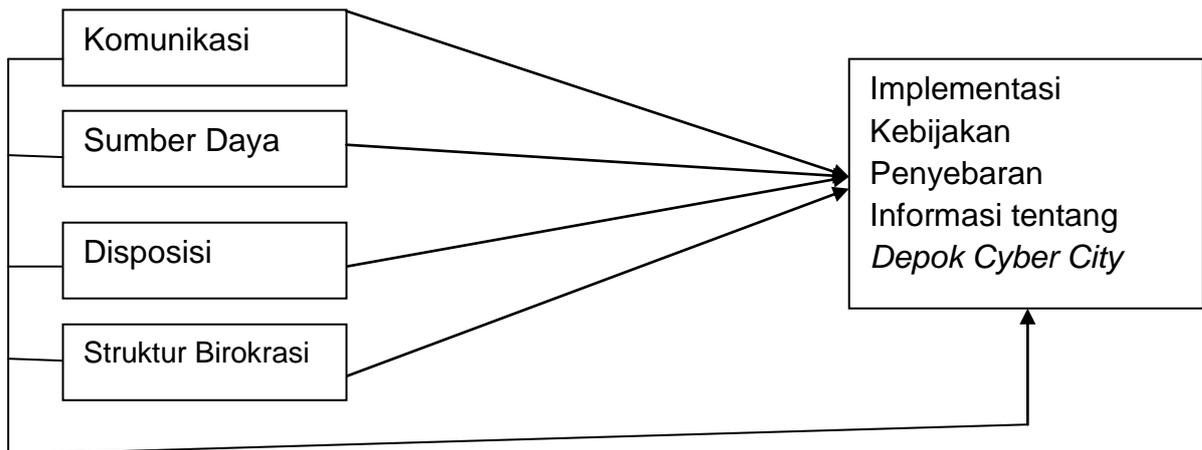


Gambar 3.1.
Model George Edwards III (Faktor-faktor Penentu Implementasi Kebijakan Publik)

Sumber: Edwards III (1980:148), dikutip dari Subarsono (2011: 91)

Sedangkan model analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran

informasi publik mengenai *Depok Cyber City* pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, berdasarkan model Edwards III adalah sebagai berikut:



Gambar 3.2.
Kerangka Penelitian Analisis Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi pada Diskominfo Kota Depok

3.2. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan landasan teori yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

1. Hipotesis 1 (H1): ada pengaruh yang signifikan antara komunikasi terhadap keberhasilan penyebaran informasi publik yang dilakukan Diskominfo Kota Depok.
2. Hipotesis 2 (H2): ada pengaruh yang signifikan antara sumberdaya terhadap keberhasilan penyebaran informasi publik yang dilakukan Diskominfo Kota Depok.

3. Hipotesis 3 (H3): ada pengaruh yang signifikan antara disposisi terhadap keberhasilan penyebaran informasi publik yang dilakukan Diskominfo Kota Depok.
4. Hipotesis 4 (H4): ada pengaruh yang signifikan antara struktur birokrasi terhadap keberhasilan penyebaran informasi publik yang dilakukan Diskominfo Kota Depok.
5. Hipotesis 5 (H5): ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi terhadap keberhasilan penyebaran informasi publik yang dilakukan Diskominfo Kota Depok.

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi konseptual dan operasional dalam penelitian ini dapat diringkaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Variabel, Dimensi, dan Indikator Penelitian

No	Variabel	Dimensi	Indikator
1.	Dependen Variabel Keberhasilan/kegagalan Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi tentang <i>Depok Cyber City</i>	Pemahaman implementator pada upaya untuk mencapai keberhasilan kebijakan <i>Depok Cyber City</i>	Tingkat keberhasilan/kegagalan atas penyebaran informasi tentang <i>Depok Cyber City</i> kepada masyarakat di Kota Depok
2.	Independen Variabel		
	1. Komunikasi Definisi Konseptual: Penyampaian pesan/informasi mengenai kebijakan	1. Transmisi Adanya cara penyampaian yang tepat mengenai sosialisasi/penyebaran	1. Kejelasan komunikasi (informasi yang disampaikan) 2. Konsistensi komunikasi

	tentang Depok Cyber City Definisi Operasional: Kebijakan dikomunikasikan kepada publik melalui saluran berbagai sarana seperti sosialisasi langsung, media massa dan media komunikasi lainnya	informasi mengenai Depok Cyber City 2. Kejelasan pesan Adanya kejelasan pesan yang disampaikan mengenai Depok Cyber City	3. Media penyebaran informasi 4. Data dan kemasan informasi
No	Variabel	Dimensi	Indikator
	2. Sumberdaya Definisi Konseptual: Terkait sumberdaya pelaksana dari suatu kebijakan Konsep Operasional: Kualitas dan kuantitas SDM, fasilitas pendukung, keuangan, informasi dan kewenangan dalam mendukung terlaksananya implementasi kebijakan.	1. Kuantitas SDM Rasio sumberdaya yang sesuai dengan ketentuan dalam mendukung kebijakan mengenai Depok Cyber City 2. Kualitas SDM Pelaksana kebijakan yang memiliki kompetensi dan berpengalaman di bidangnya 3. Fasilitas Fasilitas pendukung pelaksanaan Depok Cyber City 4. Keuangan Pengelolaan keuangan yang baik dalam mendukung pelaksanaan Depok Cyber City	1. Tersedianya sumber daya manusia 2. Kualitas skill narasumber (pemberi informasi yang kompeten dibidang informasi yang disampaikan) 3 Wewenang yang bersifat formal 4 Fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) 5 Informasi tentang cara melaksanakan kebijakan dan data kepatuhan pelaksana
	3. Disposisi Definisi Konseptual: Kecenderungan/ keinginan pelaku kebijakan memiliki disposisi (sikap) terhadap kebijakan. Definisi Operasional: Komitemen pelaksana dalam melaksanakan program Depok Cyber City, penempatan staf	1. Komitmen Adanya komitmen dari implementator dalam melaksanakan program Depok Cyber City 2. Penempatan Staf Penempatan staf yang sesuai dengan keahliannya 3. Insentif Insentif yang diberikan	1. Kemampuan pelaksana dan dedikasi pada publik 2. Tindakan atau sikap terhadap informasi yang baru diketahui/ diterima 3. Insentif, menambah keuntungan atau biaya dalam pelaksanaan kebijakan

	sesuai pekerjaannya, dan pemberian insentif dalam pelaksanaan kebijakan.	sesuai dengan porsinya	4. Tanggapan pelaksana atas suatu kebijakan
No	Variabel	Dimensi	Indikator
	<p>4. Struktur Birokrasi</p> <p>Definisi Konseptual: Adalah struktur organisasi atau pola hubungan antar jajaran birokrasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan</p> <p>Definisi Operasional: <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> dan pembagian tugas serta pertanggungjawabannya.</p>	<p>1. SOP Adanya sejenis standard operating procedures (SOP)</p> <p>2. Fragmentation Adanya pembagian tugas tanggung jawab</p>	<p>1. Hubungan dengan pihak terkait</p> <p>2. Batasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab pelaksana kebijakan</p> <p>3. Strategi penyebaran informasi (<i>standar action</i>)</p>

Sumber: Adaptasi dari model Edwards III

Variabel penelitian yang telah didefinisikan dan tercantum dalam kerangka pemikiran di atas, selanjutnya akan operasionalisasikan dan diukur. Dalam hal operasionalisasi variabel, variabel-variabel tersebut menjadi indikator-indikator pentingnya. Pengukuran yang digunakan dalam bentuk skala interval akan diterapkan pada semua item pertanyaan yang terdiri dari beberapa pertanyaan alternatif, dimana nilai 1 untuk tingkat paling rendah dan nilai 5 untuk tingkat yang paling tinggi. Nilai 2 untuk nilai yang rendah, nilai 3 untuk tingkat cukup tinggi dan nilai 4 untuk tingkat yang tinggi.

Jadi, fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan sosialisasi/penyebaran informasi publik mengenai Depok *Cyber City* serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

3.4. Teknik Pengumpulan Data dan Pengambilan Sampel

3.4.1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua macam sumber, yaitu:

1. Subyek Penelitian, yaitu sumber data primer yang merespons pertanyaan mengenai dirinya, dan juga merupakan subyek penelitian yang dapat memberikan respons atas pertanyaan yang diajukan. Dalam penelitian ini respondennya adalah seluruh pegawai pada Diskominfo Kota Depok.
2. Data sekunder yang peneliti kumpulkan serta dapatkan dari berbagai sumber kedua seperti buku-buku referensi, hasil penelitian, publikasi laporan, serta sumber bacaan dan informasi lainnya.

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data mengenai masalah implementasi penyebaran informasi mengenai *Depok Cyber City* yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Depok kepada warga di kota tersebut. Sejumlah data yang diambil untuk kemudian dilakukan analisis antara lain sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, yakni melalui pemanfaatan data-data sekunder yang tersedia berbagai media, baik yang dikeluarkan oleh Dinas Kominfo, Pemkot, maupun media massa.
- b. Wawancara mendalam (*indepth interview*) untuk mendapatkan data kualitatif serta beberapa keterangan yang tidak diperoleh dari data sekunder di atas.

3.4.2. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data-data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini secara umum adalah data kuantitatif, sehingga rancangan penelitian ini akan lebih banyak

mempergunakan pendekatan-pendekatan kuantitatif tanpa mengurangi kemungkinan untuk mengaplikasikan pendekatan-pendekatan kualitatif.

Pengumpulan data dilakukan dengan mempergunakan daftar pertanyaan tertutup, yang dimaksudkan untuk mendapatkan data tentang variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi, serta keberhasilan implementasi kebijakan mengenai *Depok Cyber City*.

Beberapa metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah observasi, wawancara, dan analisis isi (*content analysis*) dari dokumen tertulis serta dengan triangulasi yang ditujukan untuk mengecek/memperbandingkan asumsi dari sumber data.

Sugiyono menjelaskan bahwa “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek /subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.⁸ Atas dasar pengertian definisi ini, maka yang menjadi populasinya adalah seluruh pegawai di Diskominfo Kota Depok yang berjumlah 34 orang responden.

3.5. Uji Kualitas Data

Kuesioner yang sudah dibagikan kepada semua responden, lalu dikembalikan jawabannya kepada peneliti, akan disusun secara rapi dan teliti. Selanjutnya, hasil pernyataan responden yang telah dikembalikan akan diuji secara kuantitatif melalui uji validitas dan reliabilitas.

⁸ Lihat Sugiyono, “Metode Penelitian Administrasi”, Bandung: Alfabeta, 2003, hlm. 90.

3.5.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang harus dibuang/diganti karena dianggap tidak relevan (Umar, 2010: 61).

Pengujian validitas ini dilakukan secara statistik, yang dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 19, dengan langkah-langkah pengukurannya sebagai berikut:

1. Melakukan uji coba kuesioner yang telah dikembalikan oleh 34 responden (semua pegawai pada Diskominfo Kota Depok). Dengan jumlah responden sedikitnya 30 responden, menurut Husein Umar, distribusi skor (nilai) akan lebih mendekati kurva normal.
2. Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban, yang dalam penelitian ini terdapat 25 pernyataan untuk variabel X1, X2, X3, dan X4, serta 7 pernyataan untuk variabel Y.
3. Selanjutnya, dari hasil tabulasi jawaban tersebut dihitung korelasi antardata pada masing-masing pernyataan dengan skor total menggunakan rumus korelasi product moment, yang rumusnya sebagai berikut:

$$r_{11} = \frac{n (\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2] [n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

dimana:

r = indeks korelasi product moment

n = jumlah responden
X = skor item angket
Y = skor total angket
 $\sum XY$ = jumlah dari instrumen x yang dikali dengan jumlah instrumen y
 $\sum X^2$ = jumlah kuadrat kriteria X
 $\sum Y^2$ = jumlah kuadrat kriteria Y

Hasil perhitungan r dikonsultasikan dengan harga r kritik product moment dengan taraf signifikansi 5%. Jika harga r hitung lebih besar dari r tabel maka dikatakan item soal itu valid. Atau dengan melihat hasil masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan.

Nilai korelasi yang telah didapatkan nantinya akan diuji untuk menyatakan apakah nilainya signifikan atau tidak. Caranya dengan uji korelasi. Bila ternyata semua nilai korelasi yang ada adalah signifikan, maka pertanyaan-pertanyaan yang ada memiliki validitas konstruksi, yang berarti terdapat konsistensi internal dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bila ternyata ada pertanyaan yang tidak signifikan, maka harus diganti atau dibuang, lalu diuji kembali hingga valid.

Uji validitas dengan korelasi Pearson, menggunakan SPSS, menurut Ghozali (2002) harus memenuhi kriteria valid apabila korelasinya bernilai positif dan nilai probabilitas korelasi [sig.(2-tailed)] < taraf signifikan (α) sebesar 0,05. Sebaliknya, jika tidak memenuhi kriteria di atas maka instrumennya dianggap tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama. Dengan kata lain, kuesioner harus konsisten (Umar, 2010: 63).

Karena skor dalam kuesioner penelitian ini menggunakan angka 1 sampai dengan 5, maka untuk mencari reliabilitas instrumen dipergunakan rumus *Alpha Cronbach* (*Cronbach's Alpha*). Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \delta b^2}{\delta t^2} \right)$$

dimana:

r_{11} = reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir pertanyaan

δt^2 = varian total

$\sum \delta b^2$ = jumlah varians butir

Jumlah varian butir ditetapkan dengan cara mencari nilai varian tiap butir, kemudian dijumlahkan, dengan rumus varian yang digunakan:

$$\delta^2 = \frac{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n-1}}{n-1}$$

di mana:

δ = varian tiap butir

n = jumlah responden

X = nilai skor yang dipilih (total nilai dari nomor-nomor butir pertanyaan)

Hasil reliabilitas dikonsultasikan dengan harga *r product moment* pada taraf signifikan 5%. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dapat dikatakan reliabel.

3.5.2. Analisis Regresi

Jika jumlah variabel dependen bergantung pada lebih dari satu variabel independen, maka hubungan antara kedua variabel disebut analisis regresi berganda (*multiple regression*). Bentuk rumusnya adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

di mana:

Y = Variabel dependen

a = Konstanta b_1, b_2, b_3, b_4 = Koefisien regresi

e = variabel random yang berdistribusi normal dengan nilai rata-rata 0

Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang linear antara variabel dependen (Y) dengan variabel independen X_1, X_2, X_3, X_4 , maka hipotesis yang digunakan adalah:

1. $H_0: b_1 = b_2 = b_3 \dots b_k = 0 \rightarrow$ merupakan model linier berganda yang tidak signifikan atau dengan kata lain, tidak ada hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen.
2. $H_0: b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq \dots b_k \neq 0 \rightarrow$ merupakan model regresi linear berganda signifikan atau dengan kata lain ada hubungan atau pengaruh linear antara variabel independen dengan variabel dependen.

3.6. Metode Analisis

Analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis-hipotesis penelitian. Kerlinger (2004:217) mendefinisikan

analisis sebagai kategorisasi, penataan, manipulasi dan peringkasan data untuk memperoleh jawab bagi pertanyaan penelitian.

Kegunaan analisis ialah mereduksi data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji. Sedangkan data hasil-hasil penelitian ditarik kesimpulan, biasanya berupa hasil-hasil numerik seperti skor tes dan statistik seperti nilai modus, presentase dan koefisien korelasi.

Analisis data penelitian tidak secara otomatis menyediakan jawab atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Diperlukan interpretasi atau penafsiran atas data tersebut. Interpretasi atau menafsir adalah menjelaskan dan menemukan arti, ini berarti menggarap hasil-hasil analisis, membuat inferensi yang relevan dengan masalah penelitian yang dikaji serta membuat kesimpulan.

Pengambilan sampel dilakukan dengan probabilitas sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan teknik pengambilan sampel dilakukan secara sample random sampling yaitu cara pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Alat pengumpul data pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil angket. Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan-pertanyaan tertulis yang perlu direspon oleh responden.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei deskriptif, yaitu mengumpulkan data keadaan di lapangan sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian sesuai variabel yang diteliti. Metode penelitian ini bertujuan menguji hipotesis dengan cara mendasarkan pada pengamatan terhadap akibat yang terjadi dari

faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu (Rusidi, 1989: 19). Konsekuensinya dari analisis ini memerlukan operasionalisasi variabel-variabel yang diukur secara kuantitatif.

Pengujian hipotesis digunakan dengan metode statistik. Untuk memperoleh informasi dari responden digunakan metode angket atau kuesioner sebagai alat pengumpul data. Kuesioner ini disusun sesuai indikator dari variabel yang diteliti, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang disediakan. Angket menggunakan skala Likert (skala lima), yaitu dari jawaban yang paling positif sampai yang paling negatif.

Setelah dilakukan skoring dan tabulasi data, data penelitian diolah secara deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan analisa statistik. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif, yaitu menarik kesimpulan dari hasil penelitian didasarkan melalui perhitungan-perhitungan statistik dalam menganalisa seluruh data yang diperoleh.

Untuk menunjang kualitas penelitian juga dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam pada sejumlah key informan yang dianggap mengetahui dan memahami topik penelitian ini. Sehingga, dengan demikian diharapkan penelitian ini menghasilkan *output* yang terbaik.

3.7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, yang terletak di Balai Kota II Lantai 7, Jalan Margonda Raya, Kota

Depok. Lokasi terpilih karena sesuai dengan responden yang ditentukan yaitu seluruh pegawai pada kantor dinas tersebut.

3.8. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Depok. Jumlah pegawai di lingkungan OPD ini adalah sebanyak 34 orang.

Berdasarkan data tersebut, teknik pengambilan data penelitian ini ditentukan berdasarkan sensus,⁹ yaitu diambil dari seluruh responden Diskominfo Kota Depok, sehingga penelitian ini dilakukan dengan meminta pendapat kepada seluruh responden di dinas tersebut secara menyeluruh.

⁹ Pengambilan seluruh responden sebagai sampling disebut sebagai penelitian survei, yang tidak perlu melalui kaidah teknik sampling. Lihat Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 69.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

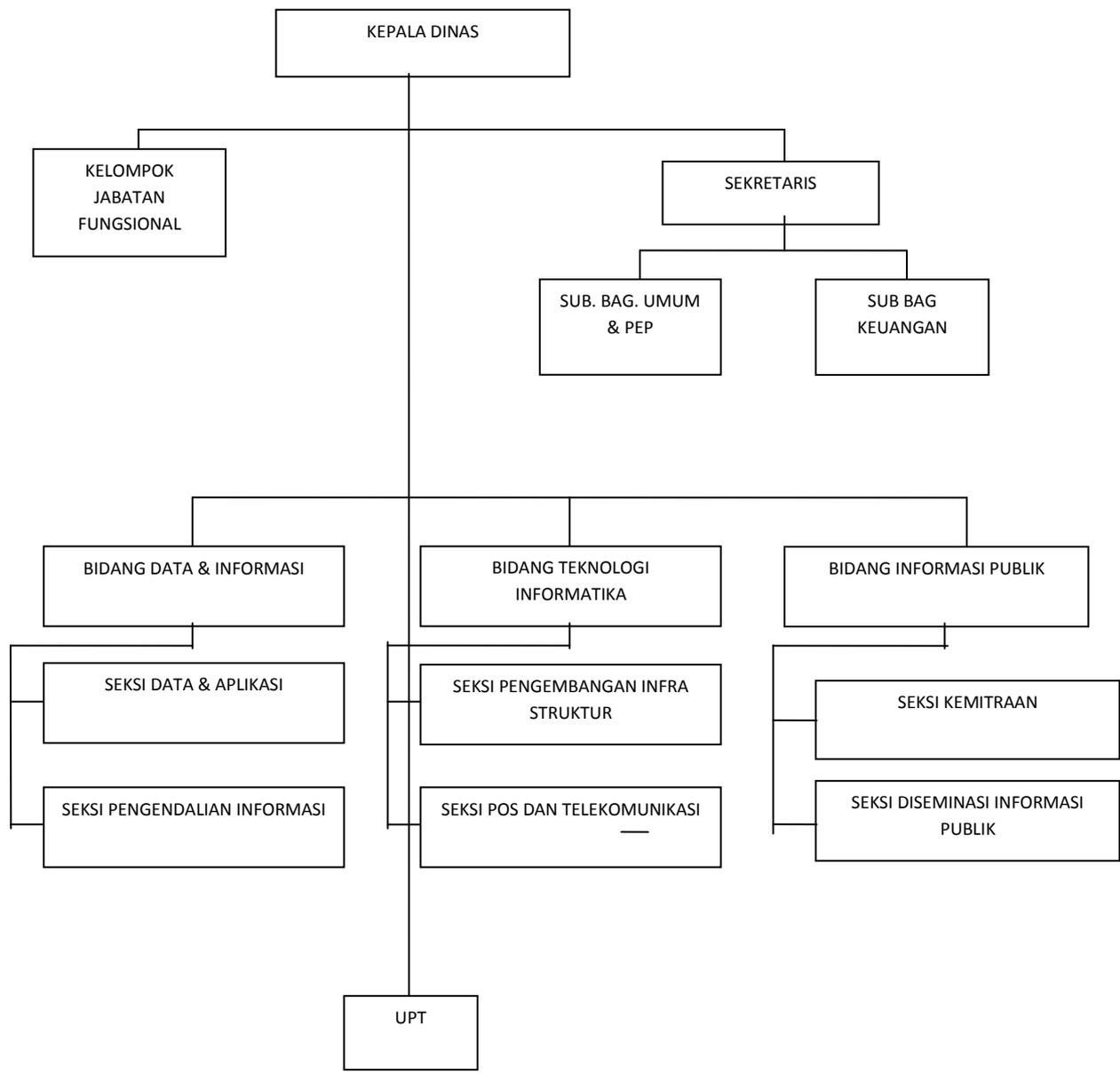
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di bawah struktur Pemerintah Daerah Kota Depok. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Depok Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informasi. Dalam pelaksanaan tugasnya Diskominfo mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Kota ;
- b. Pelaksanaan kegiatan pos dan telekomunikasi serta penyediaan sarana komunikasi dan diseminasi ;
- c. Perumusan bahan kebijakan dan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika;

- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang teknologi informasi dan bidang pos telekomunikasi dan diseminasi informasi;
- f. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan Anggaran Dinas ;
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai bidang tugasnya;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya;

Diskominfo Kota Depok dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh tiga orang Kepala Bidang, dua orang Kepala Sub Bidang, serta tiga orang Kepala Seksi.

Bidang Data dan Informasi membawahkan Seksi Data dan Aplikasi dan Seksi Pengendalian Informasi. Bidang Teknologi Informatika membawahkan Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Seksi Pos dan Telekomunikasi. Sedangkan Bidang Informasi Publik membawahkan Seksi Kemitraan dan Seksi Diseminasi Informasi Publik. Struktur organisasi sebagaimana tergambar dalam bagan berikut:



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Diskominfo Kota Depok

Bidang yang terkait secara intens dengan penyebaran informasi publik di Diskominfo Kota Depok adalah Bidang Informasi Publik, yang secara umum bertugas:

- (1) Bidang Informasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang informasi publik.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Informasi Publik mempunyai fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Informasi Publik mengacu pada rencana strategis dinas;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan informasi publik melalui berbagai media informasi;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga, dan komunitas masyarakat;
- d. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembangunan, pengembangan, pengendalian pemeliharaan dan pemerataan pelayanan diseminasi informasi;
- e. Pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis serta pengendalian di bidang informasi publik;
- f. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang informasi publik;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Informasi Publik ini terdiri dari :

- a. Seksi Kemitraan; dan
- b. Seksi Diseminasi Informasi Publik.

Seksi Kemitraan:

- (1) Seksi Kemitraan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kemitraan dan pemberdayaan masyarakat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Kemitraan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi kemitraan pada rencana strategis bidang;
 - b. melaksanakan kebijakan di bidang kemitraan meliputi hubungan kemitraan dengan pemerintah pusat, kemitraan pemerintah daerah dan kemitraan dengan berbagai lembaga seperti : perguruan tinggi, lembaga swasta, lembaga asing, perusahaan swasta melalui program CSRnya, serta dengan berbagai komunitas real maupun komunitas di dunia maya;
 - c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kemitraan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi serta berbagai lembaga swasta / asing / masyarakat dan berbagai komunitas;
 - e. Pelaksanaan pengawasan / pengendalian terhadap lembaga komunikasi sosial, lembaga komunikasi pemerintah daerah, kelompok informasi masyarakat dan semua bentuk media;
 - f. Pelaksanaan pembinaan kelompok informasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;

- g. Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan kemitraan;
- h. Pelaksanaan pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian hubungan kemitraan;
- i. Penyusunan laporan, evaluasi dan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan hubungan kemitraan;
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

Seksi Diseminasi Informasi Publik

- (1) Seksi Desiminasi Informasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sarana komunikasi dan desiminasi informasi publik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Desiminasi informasi Publik mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan program kerja seksi Desiminasi informasi publik mengacu pada rencana strategis bidang;
 - b. Pelaksanaan desiminasi informasi publik nasional;
 - c. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pengelolaan informasi publik pembangunan Kota Depok;
 - d. Pelaksanaan penyediaan, penyebaran informasi, dan koordinasi informasi pembangunan Kota Depok;

- e. Pelaksanaan diseminasi informasi public melalui media cetak dan elektronik (*running text*, radio, televisi, *website* dan media multimedia lainnya), papan informasi, majalah dinding, film, serta melalui media tradisional, dan kelompon informasi masyarakat;
- f. Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan diseminasi informasi publik;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian diseminasi informasi publik;
- h. Penyusunan laporan, evaluasi dan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan diseminasi informasi publik;
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2 Pembahasan

4.2.1. Profil Responden

Responden dalam penelitian ini menggunakan metode sensus, yakni melibatkan seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok. Hal itu dikarenakan jumlah pegawainya mencapai 34 orang.

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin¹⁰

Jenis Kelamin	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid Laki-laki	16	47,1	47,1	47,1
Perempuan	18	52,9	52,9	100,0
Total	34	100,0	100,0	

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebagian reponden perempuan yaitu sebanyak 18 orang (52,9%), sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 16 orang (47,1%). Dengan demikian pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok didominasi oleh perempuan.

Tabel 4.2.
Profil Responden Dikelompokan Berdasarkan Pendidikan Terakhir¹¹

Pendidikan Terakhir	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid D1-D3	4	11,8	11,8	11,8
S1	16	47,1	47,1	58,8
S2	11	32,4	32,4	91,2
SMA	3	8,8	8,8	100,0
Total	34	100,0	100,0	

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa reponden pendidikan terakhir D1-D2 sebanyak 4 orang (11,8%), S1 sebanyak 16 orang (47,1%), S2 sebanyak 11 orang (32,4%), sedangkan yang SMA sebanyak 3 orang (8,8%). Dengan demikian pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh pegawai yang berpendidikan terakhir S1.

¹⁰ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 2

¹¹ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 2

Tabel 4.3.
Profil Responden Dikelompokan Berdasarkan Golongan Jabatan¹²

Golongan	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid II	7	20,6	20,6	20,6
III	18	52,9	52,9	73,5
IV	9	26,5	26,5	100,0
Total	34	100,0	100,0	

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa reponden dikelompokan berdasarkan golongan jabatan II sebanyak 7 orang (20,6%), golongan jabatan III sebanyak 18 orang (52,9%), golongan jabatan IV sebanyak 9 orang (26,5%). Dengan demikian pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok berdasarkan golongan jabatan didominasi oleh pegawai golongan III.

Tabel 4.4.
Profil Responden Dikelompokan Berdasarkan Usia¹³

Usia/Umur	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid 21-30	9	26,5	26,5	26,5
31-40	20	58,8	58,8	85,3
41-50	5	14,7	14,7	100,0
Total	34	100,0	100,0	

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa reponden dikelompokan berdasarkan usia 21-30 sebanyak 9 orang (26,5%), usia 31-40 sebanyak 20 orang (58,8%), sedangkan usia 41-50 sebanyak 5 orang (14,7%). Dengan demikian pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok berdasarkan usia didominasi oleh pegawai yang berusia antara 31 sampai 40.

Setelah mengetahui seluruh jumlah responden, maka peneliti kemudian membagikan kuesioner kepada mereka (tanggal 24 April 2014). Setelah diketahui

¹² Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 2

¹³ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 2

data responden, peneliti melakukan analisis terhadap data tersebut. Deskripsi ini akan menyajikan hasil kuesioner dari responden dengan menggunakan tabel distribusi pada tiap-tiap indikator untuk mengetahui prosentase tanggapan responden atas faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penyebaran informasi publik mengenai Depok *Cyber City* pada masyarakat di Kota Depok.

4.2.2. Hasil Uji Kualitas Data

4.2.2.1. Validitas dan Reliabilitas

Dalam penelitian ini, uji kualitas data dilakukan terhadap uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas berguna untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Daftar pertanyaan ini pada umumnya mendukung suatu kelompok variabel tertentu (Sujarweni, 2014: 192). Uji validitas ini berguna untuk mengetahui valid tidaknya setiap butir pertanyaan/ Pernyataan kepada responden. Sebagai instrumen penelitian, butir kuesioner yang valid berarti butir kuesioner tersebut dapat dijadikan alat ukur untuk menilai apa yang hendak diukur dalam penelitian ini. Kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini. uji validitas dalam penelitian ini menggunakan analisis item yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total butir yang merupakan jumlah skor butir.

Hasil pengujian dengan menggunakan korelasi *product moment Pearson* untuk tiap butir kuesioner menghasilkan r_{hitung} yang kemudian dibandingkan dengan r_{tabel} dengan taraf signifikansi 95% atau $\alpha = 0,05$. Berdasarkan hasil

pengujian terhadap 34 responden dengan bantuan SPSS versi 19.00, maka hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Hasil Uji Validitas¹⁴

No	r_{hitung}					r_{tabel}	Ket.
	Komunikasi	Sumber Daya	Disposisi	Birokrasi	Implementasi		
1	0,500	0,662	0,655	0,706	0,507	0,338	Valid
2	0,427	0,460	0,539	0,531	0,517	0,338	Valid
3	0,590	0,550	0,643	0,398	0,446	0,338	Valid
4	0,488	0,815	0,772	0,756	0,701	0,338	Valid
5	0,500	0,458	-	0,706	0,507	0,338	Valid
6	0,470	0,550	-	-	0,506	0,338	Valid
7	0,567	0,663	-	-	0,422	0,338	Valid
8	0,590	0,550	-	-	-	0,338	Valid

Dari hasil perhitungan uji validitas di atas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan pada kuesioner memiliki koefisien korelasi (r_{hitung}) lebih besar dari $r_{tabel} = 0,338$. Hal ini berarti bahwa seluruh item pertanyaan dalam kuesioner adalah valid, sehingga dapat digunakan sebagai alat pengumpul data. Sedangkan untuk uji reliabilitas dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas¹⁵

Variabel	Reliabilitas (r_{hitung})	Nilai (r_{tabel})	Keterangan
Komunikasi (X_1)	0,701	0,338	Reliabel
Sumber Daya (X_2)	0,740	0,338	Reliabel
Disposisi (X_3)	0,749	0,338	Reliabel
Struktur Birokrasi (X_4)	0,729	0,338	Reliabel
Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik (Y)	0,698	0,338	Reliabel

¹⁴ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 3

¹⁵ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 3

Dari hasil perhitungan uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa variabel Komunikasi (X_1), Sumber Daya (X_2), Disposisi (X_3), Struktur Birokrasi (X_4), dan Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik (Y) memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari $r_{tabel} = 0,338$. Dengan demikian alat ukur dinyatakan reliabel untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data.

4.2.2.2. Pengujian Persyaratan Analisis Data

Sebelum hipotesis diuji kebenarannya, terlebih dahulu dilakukan pengujian persyaratan antara lain : menguji normalitas dan homogenitas. Pengujian tersebut dilakukan untuk mengetahui data hasil dari penelitian tersebut apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum untuk uji statistik parametrik (uji koefisien korelasi). Pengujian normalitas dan homogenitas dilakukan pada data variabel terikat yaitu Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik (Y) serta data variabel bebas yaitu Komunikasi (X_1), Sumber Daya (X_2), Disposisi (X_3), Struktur Birokrasi (X_4).

4.2.2.3. Hasil Uji Normalitas

Pengujian menggunakan rumus *Kolmogorov Smirnov*, apabila hasilnya menunjukkan harga sig minimum lebih besar dari harga α maka dinyatakan data yang digunakan berdistribusi normal. Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas galat taksiran dengan menggunakan rumus *Kolmogorov Smirnov* memberikan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.7. Hasil Uji Normalitas Populasi¹⁶

No	Galat Taksiran	Harga Sig Minimum	Harga α	Kesimpulan
1	Y atas X ₁	0,060	0,05	Harga sig lebih besar dari 0,05, berarti galat taksiran berdistribusi normal.
2	Y atas X ₂	0,067	0,05	
3	Y atas X ₃	0,082	0,05	
4	Y atas X ₄	0,081	0,05	

Sesuai dengan ketentuan di atas, maka untuk semua variabel yang menyatakan sebaran sampel mengikuti distribusi normal dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : sebaran skor variabel Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik (Y) atas variabel Komunikasi (X₁), Sumber Daya (X₂), Disposisi (X₃), Struktur Birokrasi (X₄) berdistribusi normal.

4.2.2.4. Hasil Uji Homogenitas

Pengujian homogenitas menggunakan rumus *Levene*, apabila hasilnya menunjukkan harga sig minimum lebih besar dari harga α maka dinyatakan harga yang digunakan berdistribusi homogen. Berdasarkan hasil perhitungan uji homogenitas galat taksiran dengan menggunakan rumus *Levene* memberikan hasil sebagai berikut :

¹⁶ Perhitungan pada lampiran 4 tentang Uji Normalitas

Tabel 4.8. Hasil Uji Homogenitas Populasi¹⁷

No	Galat Taksiran	Harga Sig Minimum	Harga α	Kesimpulan
1	Y atas X ₁	0,137	0,05	Harga sig lebih besar dari 0,05, berarti galat taksiran berdistribusi homogen.
2	Y atas X ₂	0,110	0,05	
3	Y atas X ₃	0,541	0,05	
4	Y atas X ₄	0,086	0,05	

Sesuai dengan ketentuan di atas, maka untuk semua variabel yang menyatakan sebaran sampel mengikuti distribusi homogen dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: sebaran skor variabel Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik (Y) atas variabel Komunikasi (X₁), Sumber Daya (X₂), Disposisi (X₃), Struktur Birokrasi (X₄) berdistribusi homogen.

4.2.2.5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi apabila variasi residual regresi (u_t) tidak konstan atau berubah-ubah secara sistematis seiring dengan berubahnya nilai variabel independen. Konsekuensi dari keberadaan heteroskedastisitas adalah analisis regresi akan menghasilkan estimator yang bias untuk nilai variasi u_t dan dengan demikian variasi dari koefisien regresi. Akibatnya uji t, uji F dan estimasi nilai variabel dependen menjadi tidak valid. Uji yang dipergunakan adalah uji *Spearman* dimana dilakukan perhitungan dari korelasi *rank spearman* antara variabel absolut u_t dengan variabel-variabel bebas. Kemudian nilai dari semua *rank spearman* tersebut dibandingkan dengan nilai signifikansi yang ditentukan, yaitu $\alpha = 0,05$. Masalah heteroskedastisitas tidak terjadi bila nilai *rank*

¹⁷ Perhitungan pada lampiran 4 tentang Uji Homogenitas

spearman antara variabel absolut residual regresi dengan variabel-variabel bebas lebih besar dari nilai signifikansi (α). Berikut hasil perhitungan heteroskedastisitas dengan menggunakan SPSS versi 19.00:

Tabel 4.9. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Correlations		K	SD	D	S B	H
Spearman's Rho	Correlation Coefficient	1.000	.879**	.797**	.858**	.371 [*]
	K Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.000	.061
	N	34	34	34	34	34
	Correlation Coefficient	.879**	1.000	.751**	.858**	.231
	SD Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.000	.188
	N	34	34	34	34	34
	Correlation Coefficient	.797**	.751**	1.000	.827**	.235
	D Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.000	.180
	N	34	34	34	34	34
	Correlation Coefficient	.858**	.858**	.827**	1.000	.247
	S B Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.	.159
	N	34	34	34	34	34
	Correlation Coefficient	.371 [*]	.231	.235	.247	1.000
	H Sig. (2-tailed)	.061	.188	.180	.159	.
	N	34	34	34	34	34

Keterangan:

K = Komunikasi

SD = Sumber daya

D = Disposisi

SB = Struktur birokrasi

H = Nilai Heteroskedastisitas

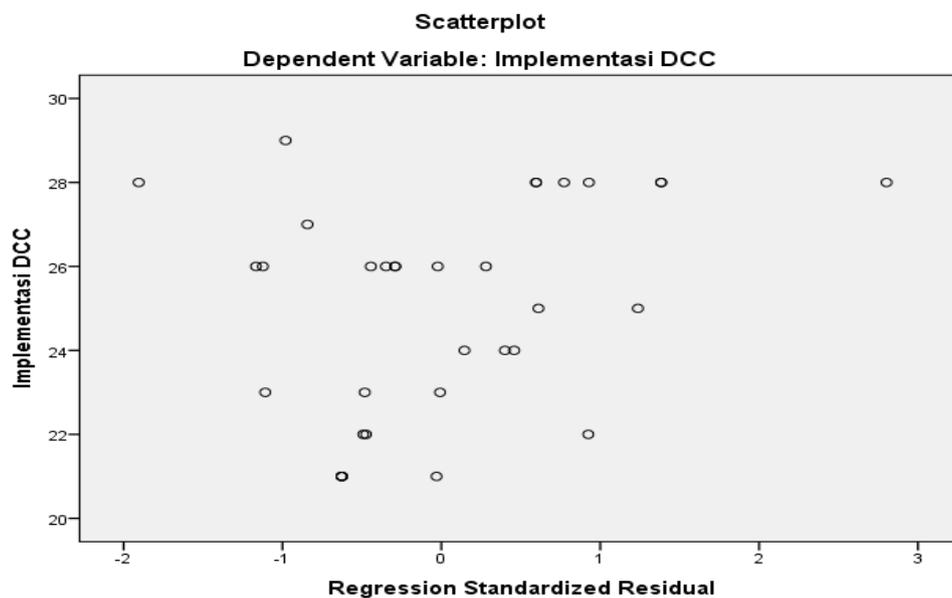
** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel di atas, dapat diperoleh hasil bahwa korelasi *rank spearman* antara komunikasi (X_1) dengan U_t adalah 0,061; korelasi *rank spearman* antara sumber daya (X_2) dengan U_t adalah 0,188; korelasi *rank spearman* antara disposisi (X_3) dengan U_t adalah 0,180; dan korelasi *rank*

spearman antara struktur birokrasi (X_4) dengan U_t adalah 0,188. Nilai signifikansi (α) yang digunakan adalah 5%, maka masalah heterokedastisitas dapat dikatakan tidak terjadi karena semua nilai korelasi *rank spearman* lebih besar dari 0,05.

Berikut ini adalah hasil uji heterokedastisitas tersebut berdasarkan diagram scatter plot :



Gambar 4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Diagram Scatter Plot)

Berdasarkan diagram scatter plot di atas dilihat bahwa suatu regresi dikatakan terdeteksi heterokedastisitasnya apabila diagram pencar residual membentuk pola tertentu. Tampak pada diagram di atas diagram pencar residual tidak membentuk suatu pola tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa regresi terbebas dari kasus heterokedastisitas.

4.2.2.6. Uji Serial korelasi (Autokorelasi)

Autokorelasi terjadi apabila nilai variabel masa lalu memiliki pengaruh terhadap nilai variabel masa kini. Autokorelasi akan menyebabkan estimasi nilai

u_t yang terlalu rendah, dan karenanya menghasilkan estimasi yang terlalu tinggi untuk nilai koefisien korelasi. Bahkan ketika estimasi nilai variasi u_t tidak terlalu rendah, maka estimasi nilai variasi dari koefisien regresi mungkin akan terlalu rendah, dan karenanya uji t dan uji F menjadi tidak valid lagi atau menghasilkan konklusi yang menyesatkan, untuk melakukan uji autokorelasi untuk memberikan hasil yang menyatakan bahwa data yang diuji tidak dapat dipastikan apakah lolos dari masalah autokorelasi atau tidak, menggunakan uji *run test*, uji ini dipergunakan untuk melihat apakah data residual bersifat acak atau tidak. Bila tidak acak, berarti terjadi masalah autokorelasi. Residual regresi diolah dengan uji *run test*, kemudian dibandingkan dengan tingkat signifikansi (α) yang dipergunakan. Apabila nilai hasil uji *run test* lebih besar daripada tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$), maka tidak terdapat masalah otokorelasi pada data yang diuji. Berikut hasil perhitungan uji autokorelasi (uji *run test*) dengan menggunakan SPSS versi 19.00:

Tabel 4.10. Hasil Uji Autokorelasi (Run Test)

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.12812
Cases < Test Value	17
Cases >= Test Value	17
Total Cases	34
Number of Runs	19
Z	.174
Asymp. Sig. (2-tailed)	.862

a. Median

Berdasarkan tabel di atas, hasil *run test* (0,862) lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian, data yang dipergunakan cukup random sehingga tidak terdapat masalah otokorelasi pada data yang diuji.

4.2.2.7. Analisis Distribusi Frekuensi

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam pendekatan teori yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka penulis akan memfokuskan faktor yang mempengaruhi implementasi keberhasilan penyebaran informasi publik yang dilakukan Diskominfo Kota Depok.

Faktor utama yang diduga sangat berpengaruh tersebut adalah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Analisis terhadap keempat faktor tersebut dilakukan secara deskriptif, yakni dengan menguraikan jawaban dari hasil analisis distribusi frekuensi yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang disebar koresponden. Analisis deskriptif terhadap variabel faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi keberhasilan penyebaran informasi publik yang dilakukan oleh pegawai di Diskominfo Kota Depok adalah sebagai berikut:

4.2.2.7.1. Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi yang mempengaruhi implementasi keberhasilan penyebaran informasi publik dinilai berdasarkan indikator-indikator kejelasan komunikasi, konsistensi komunikasi, media penyebaran informasi, konten informasi dan kemasan informasi. indikator-indikator ini merupakan salah satu persyaratan penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan khususnya dalam penyebaran informasi publik. Ini sesuai pendapat Edwards III,

sebagaimana dikutip oleh Winarno (2002:126), yang menyatakan persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.

Tabel 4.11.
Tanggapan Responden Terhadap Frekuensi Sosialisasi DCC¹⁸

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Sering	0	0
Sering	4	11,8
Cukup	26	76,5
Kadang-kadang	3	8,8
Tidak Pernah	1	2,9
Total	34	100,0

Dari hasil pengolahan dalam tabel di atas, tanggapan responden terhadap frekuensi sosialisasi DCC diperoleh 11,8% responden menyatakan sering, 76,5% responden menyatakan cukup karena Diskominfo selalu mengadakan penyuluhan/sosialisasi. 8,8% kadang-kadang, dan 2,9% tidak pernah.

Dari hasil tersebut diasumsikan bahwa rata-rata responden cukup terhadap frekuensi sosialisasi DCC.

Tabel 4.12.
Tanggapan Responden terhadap Pengadaan Pelatihan IT DCC¹⁹

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Sering	20	58,8
Sering	5	14,7
Cukup	7	20,6
Kadang-kadang	2	5,9
Tidak Pernah	0	0
Total	34	100,0

¹⁸ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

¹⁹ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

Dari hasil pengolahan dalam tabel 4.12 di atas, tanggapan responden terhadap pengadaan pelatihan teknologi informasi (IT) untuk mendukung program *Depok Cyber City* (DCC) diperoleh 58,8% responden menyatakan sangat sering, 14,7% responden menyatakan sering, 20,6% cukup dan 5,9% menyatakan kadang-kadang.

Dari hasil tersebut diasumsikan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap pengadaan pelatihan teknologi informasi (IT) untuk mendukung program *Depok Cyber City* (DCC) sering. Hal yang penting dalam mendukung keberhasilan dalam kebijakan penyebaran informasi publik yang dilakukan di Diskominfo Kota Depok.

Tabel 4.13.
Tanggapan Responden terhadap Bahasa yang Digunakan dalam Penyuluhan DCC²⁰

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Jelas	2	5,9
Jelas	7	20,6
Netral	24	70,6
Tidak Jelas	1	2,9
Sangat Tidak Jelas	0	0
Total	34	100,0

Dari hasil pengolahan dalam tabel 4.13 di atas, tanggapan responden terhadap bahasa yang digunakan dalam penyuluhan *Depok Cyber City* (DCC) diperoleh 5,9% responden menyatakan sangat jelas, 20,6% responden menyatakan jelas karena dalam penyampaian informasi narasumber memberikan contoh kasus atau deskripsi yang jelas dan mudah dimengerti, 70,6% netral, dan 2,9% menyatakan tidak jelas. Dari hasil tersebut diasumsikan bahwa rata-rata tanggapan

²⁰ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

responden terhadap bahasa yang digunakan dalam penyuluhan *Depok Cyber City* (DCC) adalah netral.

Tabel 4.14.
Tanggapan Responden terhadap Materi Tertulis yang Digunakan dalam Penyuluhan DCC²¹

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Jelas	6	17,6
Jelas	9	26,5
Netral	12	35,3
Tidak Jelas	7	20,6
Sangat Tidak Jelas	0	0
Total	34	100,0

Dari hasil pengolahan dalam tabel 4.14 di atas, tanggapan responden terhadap materi tertulis yang digunakan dalam penyuluhan *Depok Cyber City* (DCC) diperoleh 17,6% responden menyatakan sangat jelas, 26,5% responden menyatakan jelas, 35,3% netral, dan 20,6% menyatakan tidak jelas. Dari hasil tersebut diasumsikan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap materi tertulis yang digunakan dalam penyuluhan *Depok Cyber City* (DCC) netral, mengerti, dan mudah dipahami.

Tabel 4.15.
Tanggapan Responden terhadap Sosialisasi secara tidak Langsung mengenai IT DCC²²

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Sering	0	0
Sering	4	11,8
Cukup	26	76,5
Kadang-kadang	3	8,8
Tidak Pernah	1	2,9
Total	34	100,0

²¹ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

²² Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

Dari hasil pengolahan dalam tabel 4.15 di atas, tanggapan responden terhadap sosialisasi secara tidak langsung mengenai teknologi informasi (IT) untuk mendukung program *Depok Cyber City* (DCC) diperoleh 11,8% responden menyatakan sering, 76,5% cukup, 8,8% menyatakan kadang-kadang, dan 2,9% responden menyatakan tidak pernah. Dari hasil tersebut diasumsikan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap sosialisasi secara tidak langsung mengenai teknologi informasi (IT) untuk mendukung program *Depok Cyber City* (DCC) adalah cukup. Hal yang penting dalam mendukung keberhasilan dalam kebijakan penyebaran informasi publik yang dilakukan di Diskominfo Kota Depok.

Tabel 4.16.
Tanggapan Responden terhadap Tersedianya Pedoman Cara Pelaksanaan Sosialisasi mengenai IT DCC²³

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Memadai	2	5,9
Memadai	22	64,7
Netral	10	29,4
Tidak Memadai	0	0
Sangat Tidak Memadai	0	0
Total	34	100,0

Dari hasil pengolahan dalam tabel 4.16 di atas, tanggapan responden terhadap tersedianya pedoman cara pelaksanaan sosialisasi mengenai teknologi informasi (IT) untuk mendukung program *Depok Cyber City* (DCC) diperoleh 5,9% responden menyatakan sangat memadai, 64,7% responden menyatakan memadai, dan 29,4% responden menyatakan netral. Dari hasil tersebut diasumsikan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap tersedianya pedoman cara pelaksanaan sosialisasi mengenai teknologi informasi (IT) untuk mendukung program *Depok Cyber City* (DCC) adalah memadai. Hal yang penting dalam

²³ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

mendukung keberhasilan dalam kebijakan penyebaran informasi publik yang dilakukan di Diskominfo Kota Depok.

Tabel 4.17.
Tanggapan Responden terhadap Tingkat Kejelasan Isi Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi DCC²⁴

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Jelas	15	44,1
Jelas	11	32,4
Netral	8	23,5
Tidak Jelas	0	0
Sangat Tidak Jelas	0	0
Total	34	100,0

Dari hasil pengolahan dalam tabel 4.17 di atas, tanggapan responden terhadap tingkat kejelasan isi pedoman pelaksanaan sosialisasi informasi mengenai *Depok Cyber City* (DCC) diperoleh 44,1% responden menyatakan sangat jelas, 32,4% responden menyatakan jelas, dan 23,5% responden menyatakan netral. Dari hasil tersebut diasumsikan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap tingkat kejelasan isi pedoman pelaksanaan sosialisasi informasi mengenai *Depok Cyber City* (DCC) adalah sangat jelas.

Tabel 4.18.
Tanggapan Responden terhadap Tingkat Pemahaman Tujuan Kebijakan DCC²⁵

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Paham	2	5,9
Paham	7	20,6
Netral	24	70,6
Tidak Paham	1	2,9
Sangat Tidak Paham	0	0
Total	34	100,0

Dari hasil pengolahan dalam tabel 4.18 di atas, tanggapan responden

²⁴ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

²⁵ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

terhadap tingkat pemahaman tujuan pelaksanaan mengenai *Depok Cyber City* (DCC) diperoleh 5,9% responden menyatakan sangat paham, 20,6% responden menyatakan paham, 70,6% netral, dan 2,9% responden menyatakan tidak paham. Dari hasil tersebut diasumsikan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap tingkat pemahaman tujuan pelaksanaan mengenai *Depok Cyber City* (DCC) adalah netral.

4.2.2.7.2. Faktor Sumberdaya

Tabel 4.19.
Tanggapan Responden terhadap Jumlah Tenaga SDM Program Sosialisasi DCC²⁶

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Memadai	6	17,6
Memadai	3	8,8
Netral	22	64,7
Tidak Memadai	2	5,9
Sangat Tidak Memadai	1	2,9
Total	34	100,0

Dari hasil pengolahan dalam tabel 4.19 di atas, tanggapan responden terhadap jumlah tenaga SDM program sosialisasi *Depok Cyber City* (DCC) diperoleh 17,6% responden menyatakan sangat memadai, 8,8% responden menyatakan memadai, 64,7% netral, 5,9% tidak memadai, dan 2,9% responden menyatakan sangat tidak memadai. Dari hasil tersebut diasumsikan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap jumlah tenaga SDM program sosialisasi *Depok Cyber City* (DCC) adalah netral.

²⁶ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

Tabel 4.20.
Tanggapan Responden terhadap Keterlibatan SDM Program Sosialisasi DCC²⁷

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Sering	20	58,8
Sering	5	14,7
Cukup	5	14,7
Kadang-kadang	2	5,9
Tidak Pernah	0	0
Total	34	100,0

Dari hasil pengolahan dalam tabel 4.20 di atas, tanggapan responden terhadap keterlibatan SDM program sosialisasi *Depok Cyber City* (DCC) diperoleh 58,8% responden menyatakan sangat sering, 14,7% responden menyatakan sering, 14,7% cukup, dan 5,9% kadang-kadang. Dari hasil tersebut diasumsikan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap keterlibatan SDM program sosialisasi *Depok Cyber City* (DCC) adalah sangat sering terlibat.

Tabel 4.21.
Tanggapan Responden terhadap Ketersediaan Fasilitas DCC²⁸

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Lengkap	2	5,9
Lengkap	7	20,6
Cukup Lengkap	24	70,6
Tidak Lengkap	1	2,9
Sangat Tidak Lengkap	0	0
Total	34	100,0

Dari hasil pengolahan dalam tabel 4.21 di atas, tanggapan responden terhadap ketersediaan fasilitas *Depok Cyber City* (DCC) diperoleh 5,9% responden menyatakan sangat lengkap; 20,6% responden menyatakan lengkap; 70,6% cukup lengkap; dan 2,9% tidak lengkap. Dari hasil tersebut diasumsikan

²⁷ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

²⁸ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap ketersediaan fasilitas *Depok Cyber City* (DCC) adalah cukup lengkap.

Tabel 4.22.
Tanggapan Responden terhadap Ketersediaan Bahan Pendukung Sosialisasi DCC²⁹

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Lengkap	12	35,3
Lengkap	10	29,4
Cukup Lengkap	12	35,3
Tidak Lengkap	0	0
Sangat Tidak Lengkap	0	0
Total	34	100,0

Dari hasil pengolahan dalam tabel 4.22 di atas, tanggapan responden terhadap ketersediaan bahan pendukung sosialisasi *Depok Cyber City* (DCC) diperoleh 35,3% responden menyatakan sangat lengkap; 29,4% responden menyatakan lengkap; dan 35,3% responden menyatakan cukup lengkap. Dari hasil tersebut diasumsikan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap ketersediaan bahan pendukung sosialisasi *Depok Cyber City* (DCC) adalah cukup lengkap.

²⁹ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

Tabel 4.23.
Tanggapan Responden terhadap Kemudahan Penggunaan Saprass dalam Mendukung Kebijakan DCC³⁰

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Mudah	0	0
Mudah	4	11,8
Cukup Mudah	26	76,5
Tidak Mudah	3	8,8
Sangat Tidak Mudah	1	2,9
Total	34	100,0

Dari hasil pengolahan dalam tabel 4.23 di atas, tanggapan responden terhadap kemudahan penggunaan sarana dan prasarana dalam mendukung kebijakan *Depok Cyber City* (DCC) diperoleh 11,8% responden menyatakan mudah; 76,5% cukup mudah; 8,8% tidak mudah; dan 2,9% responden menyatakan sangat tidak mudah. Dari hasil tersebut diasumsikan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap kemudahan penggunaan sarana dan prasarana dalam mendukung kebijakan *Depok Cyber City* (DCC) adalah cukup mudah.

Tabel 4.24.
Tanggapan Responden terhadap Keterpeliharaan Saprass dalam Mendukung Kebijakan DCC³¹

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Terpelihara	2	5,9
Terpelihara	22	64,7
Cukup	10	29,4
Tidak Terpelihara	0	0
Sangat Tidak Terpelihara	0	0
Total	34	100,0

Dari hasil pengolahan dalam tabel 4.24 di atas, tanggapan responden

³⁰ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

³¹ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

terhadap keterpeliharaan sarana dan prasarana dalam mendukung kebijakan *Depok Cyber City* (DCC) diperoleh 5,9% responden menyatakan sangat terpelihara; 64,7% responden menyatakan terpelihara; dan 29,4% responden menyatakan cukup terpelihara. Dari hasil tersebut diasumsikan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap keterpeliharaan sarana dan prasarana dalam mendukung kebijakan *Depok Cyber City* (DCC) adalah terpelihara.

Tabel 4.25.
Tanggapan Responden terhadap Bantuan Khusus Pemerintah Pusat dalam Mendukung Kebijakan DCC³²

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Sering	15	44,1
Sering	11	32,4
Cukup	8	23,5
Kadang-kadang	0	0
Tidak Pernah	0	0
Total	34	100,0

Dari hasil pengolahan dalam tabel 4.25 di atas, tanggapan responden terhadap bantuan khusus pemerintah pusat dalam mendukung kebijakan *Depok Cyber City* (DCC) diperoleh 44,1% responden menyatakan sangat sering; 32,4% responden menyatakan sering; dan 23,5% responden menyatakan cukup. Dari hasil tersebut diasumsikan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap bantuan khusus pemerintah pusat dalam mendukung kebijakan *Depok Cyber City* (DCC) adalah sangat sering.

³² Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

Tabel 4.26.
Tanggapan Responden terhadap Ketersediaan Dana dalam Mendukung Kebijakan DCC³³

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Memadai	2	5,9
Memadai	7	20,6
Netral	24	70,6
Tidak Memadai	1	2,9
Sangat Tidak Memadai	0	0
Total	34	100,0

Dari hasil pengolahan dalam tabel 4.26 di atas, tanggapan responden terhadap ketersediaan dana dalam mendukung kebijakan *Depok Cyber City* (DCC) diperoleh 5,9% responden menyatakan sangat memadai; 20,6% responden menyatakan memadai; 70,6% netral; dan 2,9% responden menyatakan tidak memadai. Dari hasil tersebut diasumsikan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap ketersediaan dana dalam mendukung kebijakan *Depok Cyber City* (DCC) adalah netral.

4.2.2.7.3. Faktor Disposisi

Tabel 4.27.
Tanggapan Responden terhadap Peningkatan Pengetahuan Mengenai DCC³⁴

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Berusaha	3	8,8
Berusaha	4	11,8
Cukup	24	70,6
Kadang-kadang	2	5,9
Tidak Pernah	1	2,9
Total	34	100,0

Dari hasil pengolahan dalam tabel 4.27 di atas, tanggapan responden

³³ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

³⁴ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

terhadap peningkatan pengetahuan mengenai *Depok Cyber City* (DCC) diperoleh 8,8% responden menyatakan sangat berusaha; 11,8% responden menyatakan berusaha; 70,6% cukup; 5,9% kadang-kadang; dan 2,9% responden menyatakan tidak pernah. Dari hasil tersebut diasumsikan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap peningkatan pengetahuan mengenai *Depok Cyber City* (DCC) adalah menyatakan cukup berusaha.

Tabel 4.28.
Tanggapan Responden terhadap Pemberian Insentif Pelaksanaan Program Sosialisasi DCC³⁵

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Sering	20	58,8
Sering	5	14,7
Cukup	7	20,6
Kadang-kadang	2	5,9
Tidak Pernah	0	0
Total	34	100,0

Dari hasil pengolahan dalam tabel 4.28 di atas, tanggapan responden terhadap pemberian insentif pelaksanaan program sosialisasi *Depok Cyber City* (DCC) diperoleh 58,8% responden menyatakan sangat sering; 14,7% responden menyatakan sering; 20,6% responden menyatakan cukup dan 5,9% responden menyatakan kadang-kadang. Dari hasil tersebut diasumsikan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap pemberian insentif pelaksanaan program sosialisasi *Depok Cyber City* (DCC) adalah menyatakan sangat sering.

³⁵ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

Tabel 4.29.
Tanggapan Responden terhadap Pemberian Insentif setelah Pelaksanaan Sosialisasi DCC³⁶

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Sering	3	8,8
Sering	9	26,5
Cukup	21	61,8
Kadang-kadang	1	2,9
Tidak Pernah	0	0
Total	34	100,0

Dari hasil pengolahan dalam tabel 4.29 di atas, tanggapan responden terhadap pemberian insentif setelah pelaksanaan sosialisasi *Depok Cyber City* (DCC) diperoleh 8,8% responden menyatakan sangat sering; 26,5% responden menyatakan sering; 61,8% responden menyatakan cukup; dan 2,9% responden menyatakan kadang-kadang. Dari hasil tersebut diasumsikan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap pemberian insentif setelah pelaksanaan sosialisasi *Depok Cyber City* (DCC) adalah menyatakan cukup.

Tabel 4.30.
Tanggapan Responden terhadap insentif yang diberikan Bernilai Penting dalam Mendukung Kebijakan DCC³⁷

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Bernilai	9	26,5
Bernilai	11	32,4
Cukup Bernilai	12	35,3
Kurang Bernilai	2	5,9
Tidak Bernilai	0	0
Total	34	100,0

Dari hasil pengolahan dalam tabel 4.30 di atas, tanggapan responden

³⁶ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

³⁷ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

terhadap insentif yang diberikan bernilai penting dalam mendukung kebijakan *Depok Cyber City* (DCC) diperoleh 11,8% responden menyatakan sangat bernilai; 41,2% responden menyatakan bernilai; 44,1% cukup bernilai; dan 2,9% kurang bernilai. Dari hasil tersebut diasumsikan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap insentif yang diberikan bernilai penting dalam mendukung kebijakan *Depok Cyber City* (DCC) adalah cukup bernilai.

4.2.2.7.4. Faktor Struktur Birokrasi

Tabel 4.31.
Tanggapan Responden terhadap Ketersediaan SOP dalam Mendukung Kebijakan DCC³⁸

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Memadai	0	0
Memadai	4	11,8
Netral	26	76,5
Tidak Memadai	3	8,8
Sangat Tidak Memadai	1	2,9
Total	34	100,0

Dari hasil pengolahan dalam tabel 4.31 di atas, tanggapan responden terhadap ketersediaan Standard Operating Procedures (SOP) dalam mendukung kebijakan *Depok Cyber City* (DCC) diperoleh 11,8% responden menyatakan memadai; 76,5% netral; 8,8% tidak memadai; dan 2,9% sangat tidak memadai. Dari hasil tersebut diasumsikan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap ketersediaan Standard Operating Procedures (SOP) dalam mendukung kebijakan *Depok Cyber City* (DCC) adalah netral.

³⁸ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

Tabel 4.32.
Tanggapan Responden terhadap Kejelasan SOP sebagai Acuan dalam Mendukung Kebijakan DCC³⁹

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Jelas	20	58,8
Jelas	5	14,7
Netral	7	20,6
Tidak Jelas	2	5,9
Sangat Tidak Jelas	0	0
Total	34	100,0

Dari hasil pengolahan dalam tabel 4.32 di atas, tanggapan responden terhadap kejelasan Standard Operating Procedures (SOP) sebagai acuan dalam mendukung kebijakan *Depok Cyber City* (DCC) diperoleh 58,8% responden menyatakan sangat jelas; 14,7% responden menyatakan jelas; 20,6% netral; dan 5,9% tidak jelas. Dari hasil tersebut diasumsikan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap kejelasan Standard Operating Procedures (SOP) sebagai acuan dalam mendukung kebijakan *Depok Cyber City* (DCC) adalah sangat jelas.

Tabel 4.33.
Tanggapan Responden terhadap Ketersediaan Tim Khusus dalam Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan DCC⁴⁰

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Memadai	2	5,9
Memadai	7	20,6
Netral	24	70,6
Tidak Memadai	1	2,9
Sangat Tidak Memadai	0	0
Total	34	100,0

Dari hasil pengolahan dalam tabel 4.33 di atas, tanggapan responden

³⁹ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

⁴⁰ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

terhadap ketersediaan tim khusus dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan *Depok Cyber City* (DCC) diperoleh 5,9% responden menyatakan sangat memadai; 20,6% responden menyatakan memadai; 70,6% responden menyatakan netral; dan 2,9% tidak memadai. Dari hasil tersebut diasumsikan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap ketersediaan tim khusus dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan *Depok Cyber City* (DCC) adalah netral.

Tabel 4.34.
Tanggapan Responden terhadap *Job Description* Tim Khusus dalam Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan DCC⁴¹

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Memadai	12	35,3
Memadai	10	29,4
Netral	12	35,3
Tidak Memadai	0	0
Sangat Tidak Memadai	0	0
Total	34	100,0

Dari hasil pengolahan dalam tabel 4.34 di atas, tanggapan responden terhadap ketersediaan *Job Description* tim khusus dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan *Depok Cyber City* (DCC) diperoleh 35,3% responden menyatakan sangat memadai; 29,4% responden menyatakan memadai; dan 35,3% responden menyatakan netral. Dari hasil tersebut diasumsikan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap ketersediaan *Job Description* tim khusus dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan *Depok Cyber City* (DCC) adalah sangat memadai.

⁴¹ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

Tabel 4.35.
Tanggapan Responden terhadap Pertemuan Berkala dengan Komunitas IT dalam Kebijakan DCC⁴²

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Sering	0	0
Sering	4	11,8
Cukup	26	76,5
Kadang-kadang	3	8,8
Tidak Pernah	1	2,9
Total	34	100,0

Dari hasil pengolahan dalam tabel 4.35 di atas, tanggapan responden terhadap pertemuan berkala dengan komunitas IT untuk mensukseskan program kebijakan *Depok Cyber City* (DCC) diperoleh 11,8% responden menyatakan sering; 76,5% responden menyatakan cukup; 8,8% kadang-kadang; dan 2,9% responden menyatakan kadang-kadang. Dari hasil tersebut diasumsikan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap pertemuan berkala dengan komunitas IT untuk mensukseskan program kebijakan *Depok Cyber City* (DCC) adalah cukup.

4.2.2.7.5. Faktor Implementasi Kebijakan

Tabel 4.36.
Tanggapan Responden terhadap Sosialisasi Informasi Kebijakan Depok Cyber City (DCC) Berhasil Dikomunikasikan Seluruh Stakeholder⁴³

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Setuju	0	0
Setuju	4	11,8
Netral	26	76,5
Tidak Setuju	3	8,8
Sangat Tidak Setuju	1	2,9
Total	34	100,0

Dari hasil pengolahan dalam tabel 4.36 di atas, tanggapan responden

⁴² Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

⁴³ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

terhadap sosialisasi informasi mengenai kebijakan *Depok Cyber City* (DCC) telah berhasil dikomunikasikan dengan seluruh *stakeholder* diperoleh 11,8% responden menyatakan setuju; 76,5% responden menyatakan netral; 8,8% tidak setuju; dan 8,8% sangat tidak setuju. Dari hasil tersebut diasumsikan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap sosialisasi informasi mengenai kebijakan *Depok Cyber City* (DCC) telah berhasil dikomunikasikan dengan seluruh *stakeholder* adalah netral.

Tabel 4.37.
Tanggapan Responden terhadap Sosialisasi Informasi Kebijakan
***Depok Cyber City* (DCC) sesuai Sasaran dan Tujuan ⁴⁴**

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Setuju	20	58,8
Setuju	5	14,7
Netral	7	20,6
Tidak Setuju	2	5,9
Sangat Tidak Setuju	0	0
Total	34	100,0

Dari hasil pengolahan dalam tabel 4.37 di atas, tanggapan responden terhadap sosialisasi informasi mengenai kebijakan *Depok Cyber City* (DCC) telah sesuai sasaran dan tujuannya diperoleh 58,8% responden menyatakan sangat setuju; 14,7% responden menyatakan setuju; 20,6% responden menyatakan netral; dan 5,9% tidak setuju. Dari hasil tersebut diasumsikan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap sosialisasi informasi mengenai kebijakan *Depok Cyber City* (DCC) telah sesuai sasaran dan tujuannya adalah sangat setuju.

⁴⁴ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

Tabel 4.38.
Tanggapan Responden terhadap Sosialisasi Informasi Kebijakan
Depok Cyber City (DCC) semua Elemen⁴⁵

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Setuju	2	5,9
Setuju	2	5,9
Netral	24	70,6
Tidak Setuju	1	2,9
Sangat Tidak Setuju	0	0
Total	34	100,0

Dari hasil pengolahan dalam tabel 4.38 di atas, tanggapan responden terhadap sosialisasi informasi mengenai kebijakan *Depok Cyber City (DCC)* telah menjangkau ke semua elemen (OPD, Komunitas IT, bisnis, dan masyarakat) se-Kota Depok diperoleh 5,9% responden menyatakan sangat setuju; 5,9% responden menyatakan setuju; 70,6% responden menyatakan netral; dan 2,9% tidak setuju. Dari hasil tersebut diasumsikan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap sosialisasi informasi mengenai kebijakan *Depok Cyber City (DCC)* telah menjangkau ke semua elemen (OPD, Komunitas IT, bisnis, dan masyarakat) se-Kota Depok adalah netral.

Tabel 4.39.
Tanggapan Responden terhadap Keterlibatan Pegawai Diskominfo
Kota Depok dalam Sosialisasi Informasi Kebijakan DCC⁴⁶

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Setuju	9	26,5
Setuju	10	29,4
Netral	15	44,1
Tidak Setuju	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0
Total	34	100,0

⁴⁵ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

⁴⁶ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

Dari hasil pengolahan dalam tabel 4.39 di atas, tanggapan responden terhadap keterlibatan pegawai Diskominfo Kota Depok dalam sosialisasi informasi kebijakan DCC diperoleh 26,5% responden menyatakan sangat setuju; 29,4% responden menyatakan setuju; dan 44,1% responden menyatakan netral. Dari hasil tersebut diasumsikan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap keterlibatan pegawai Diskominfo Kota Depok dalam sosialisasi informasi kebijakan *Depok Cyber City* (DCC) adalah netral.

Tabel 4.40.

Tanggapan Responden terhadap Kesiapan Pegawai Diskominfo Kota Depok Mensukseskan Sosialisasi Informasi Kebijakan DCC⁴⁷

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Setuju	0	0
Setuju	4	11,8
Netral	26	76,5
Tidak Setuju	3	8,8
Sangat Tidak Setuju	1	2,9
Total	34	100,0

Dari hasil pengolahan dalam tabel 4.40 di atas, tanggapan responden terhadap kesiapan pegawai Diskominfo Kota Depok dalam mensukseskan sosialisasi informasi kebijakan *Depok Cyber City* (DCC) diperoleh 11,8% responden menyatakan setuju; 76,5% responden menyatakan netral; 8,8% responden menyatakan tidak setuju; dan 2,9% responden menyatakan sangat tidak setuju. Dari hasil tersebut diasumsikan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap kesiapan pegawai Diskominfo Kota Depok dalam mensukseskan sosialisasi informasi kebijakan *Depok Cyber City* (DCC) adalah netral.

⁴⁷ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

Tabel 4.41.
Tanggapan Responden terhadap Diskominfo Kota Depok dalam Koordinasi dengan OPD Mensukseskan Sosialisasi Informasi Kebijakan DCC⁴⁸

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Setuju	2	5,9
Setuju	22	64,7
Netral	10	29,4
Tidak Setuju	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0
Total	34	100,0

Dari hasil pengolahan dalam tabel 4.41 di atas, tanggapan responden terhadap Diskominfo Kota Depok dalam koordinasi dengan OPD-OPD untuk mensukseskan sosialisasi informasi kebijakan *Depok Cyber City* (DCC) diperoleh 5,9% responden menyatakan sangat setuju; 64,7% responden menyatakan setuju; dan 29,4% responden menyatakan netral. Dari hasil tersebut diasumsikan bahwa rata-rata tanggapan Diskominfo Kota Depok dalam koordinasi dengan OPD-OPD untuk mensukseskan sosialisasi informasi kebijakan *Depok Cyber City* (DCC) adalah setuju.

Tabel 4.42.
Tanggapan Responden terhadap Penilaian Umum tentang Keberhasilan Sosialisasi Informasi DCC⁴⁹

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Setuju	10	29,4
Setuju	11	32,4
Netral	13	38,2
Tidak Setuju	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0
Total	34	100,0

⁴⁸ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

⁴⁹ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

Dari hasil pengolahan dalam tabel 4.42 di atas, tanggapan responden terhadap penilaian umum tentang keberhasilan sosialisasi informasi *Depok Cyber City* (DCC) diperoleh 29,4% responden menyatakan sangat setuju; 32,4% responden menyatakan setuju; dan 38,2% responden menyatakan netral. Dari hasil tersebut diasumsikan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap penilaian umum tentang keberhasilan sosialisasi informasi *Depok Cyber City* (DCC) adalah netral.

4.2.3. Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan pengujian persyaratan analisis dan hasilnya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, langkah berikutnya dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk menarik suatu kesimpulan yang didukung oleh data empirik. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, untuk mengetahui korelasi antara variabel komunikasi (X_1), sumber daya (X_2), disposisi (X_3), dan struktur birokrasi (X_4) dengan variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y).

Tujuan menghitung nilai koefisien determinasi untuk menerangkan model kemampuan variasi variabel bebas (*independen*) dalam memberikan pengaruh terhadap variabel terikat (*dependen*). Uji-F dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (*independen*) secara simultan terhadap variabel terikat (*dependen*). Sedangkan Uji-t untuk mengetahui seberapa besar pengaruh

yang ditimbulkan oleh variabel bebas (*independen*) secara parsial terhadap variabel terikat (*dependen*).

Penghitungan pengujian hipotesis antara variabel bebas (*independen*) terhadap variabel terikat (*dependen*), dilakukan dengan bantuan SPSS versi 19.00 *for window*. Di bawah ini adalah hasil dari analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi (R^2), Uji-F, dan Uji-t:

a. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.43.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda⁵⁰

Variabel	Koefisien	t _{hitung}	Probabilitas
(Constant)	2,714		
Komunikasi (X ₁)	0,377	3,252	0,003
Sumberdaya (X ₂)	0,251	2,637	0,013
Disposisi (X ₃)	0,012	0,099	0,922
Struktur Birokrasi (X ₄)	0,238	1,798	0,083
R² = 0,917		F_{hitung} = 79,980	

Berdasarkan tabel 4.43 di atas, dapatlah dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 2,714 + 0,377X_1 + 0,251X_2 + 0,012X_3 + 0,238X_4$$

Nilai konstanta sebesar 2,714; berarti variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y) adalah sebesar 2,714 persen, dengan asumsi bahwa variabel komunikasi (X₁), sumber daya (X₂), disposisi (X₃), dan struktur birokrasi (X₄) adalah konstan.

⁵⁰ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

Nilai koefesien variabel komunikasi (X_1) sebesar 0,377; berarti variabel komunikasi (X_1) mempunyai hubungan yang positif dengan variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y). Hal ini menunjukkan bahwa naiknya variabel komunikasi (X_1) akan menaikkan variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y). Jika terjadi kenaikan variabel komunikasi (X_1) sebesar satu persen, maka akan menaikkan variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y) sebesar 0,377 persen, dengan asumsi bahwa variabel sumber daya (X_2), disposisi (X_3), dan struktur birokrasi (X_4) tetap pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Nilai koefesien variabel sumber daya (X_2) sebesar 0,251; berarti variabel sumber daya (X_2) mempunyai hubungan yang positif dengan variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y). Hal ini menunjukkan bahwa naiknya variabel sumber daya (X_2) akan menaikkan variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y). Jika terjadi kenaikan variabel sumber daya (X_2) sebesar satu persen, maka akan menaikkan variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y) sebesar 0,251 persen, dengan asumsi bahwa variabel komunikasi (X_1), disposisi (X_3), dan struktur birokrasi (X_4) tetap pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Nilai koefesien variabel disposisi (X_3) sebesar 0,012; berarti variabel disposisi (X_3) mempunyai hubungan yang positif dengan variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y). Hal ini menunjukkan bahwa naiknya variabel disposisi (X_3) akan menaikkan variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y). Jika terjadi kenaikan variabel disposisi (X_3)

sebesar satu persen, maka akan menaikkan variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y) sebesar 0,012 persen, dengan asumsi bahwa variabel komunikasi (X_1), sumber daya (X_2), dan struktur birokrasi (X_4) tetap pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Nilai koefisien variabel struktur birokrasi (X_4) sebesar 0,238; berarti variabel struktur birokrasi (X_4) mempunyai hubungan yang positif dengan variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y). Hal ini menunjukkan bahwa naiknya variabel struktur birokrasi (X_4) akan menaikkan variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y). Jika terjadi kenaikan variabel struktur birokrasi (X_4) sebesar satu persen, maka akan menaikkan variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y) sebesar 0,238 persen, dengan asumsi bahwa variabel komunikasi (X_1), sumber daya (X_2), dan disposisi (X_3) tetap pada tingkat kepercayaan 95 persen.

b. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

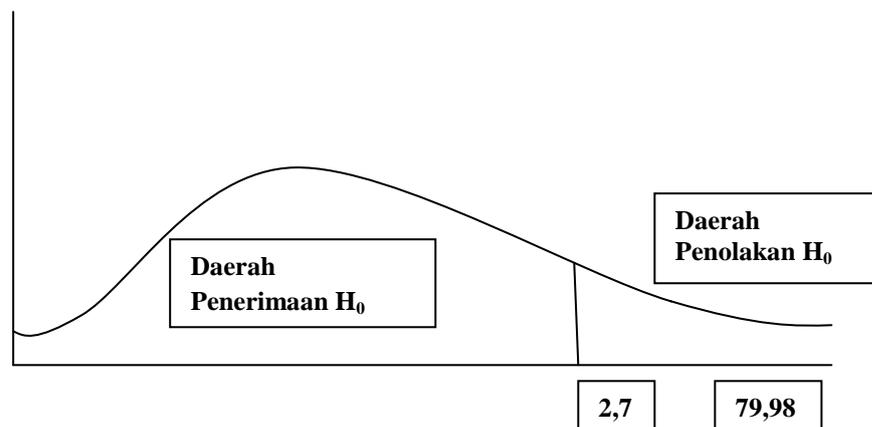
Hasil perhitungan statistik diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,917 atau 91,7 persen.⁵¹ Artinya naik turunnya variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y) sebesar 91,7 persen dipengaruhi oleh variabel komunikasi (X_1), sumber daya (X_2), disposisi (X_3), dan struktur birokrasi (X_4). Sedangkan sisanya sebesar 8,3 persen dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam model.

⁵¹ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

c. Hasil Uji F

Untuk menguji pengaruh variabel bebas (*independen*) terhadap variabel terikat (*dependen*) digunakan uji F. berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen atau $\alpha = 0,05$; diperoleh nilai F_{tabel} sebesar = 2,70 sedangkan nilai F_{hitung} sebesar = 79,98.⁵² Melalui kurva dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.3. Kurva Uji F

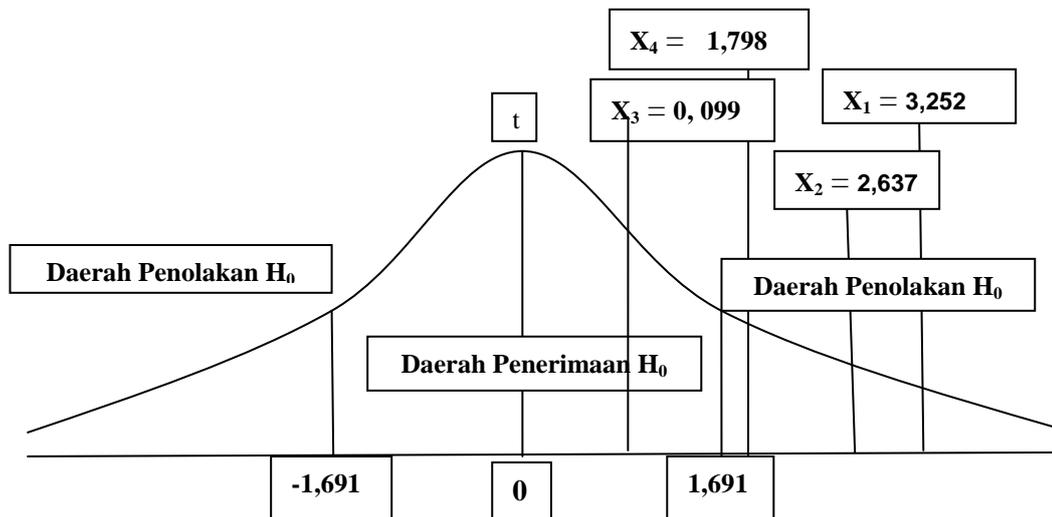


Berdasarkan gambar kurva uji F tersebut, dapat diketahui bahwa nilai $F_{\text{hitung}} > \text{nilai } F_{\text{tabel}}$ yaitu $79,98 > 2,70$; atau berada pada daerah penolakan H_0 . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel komunikasi (X_1), sumber daya (X_2), disposisi (X_3), dan struktur birokrasi (X_4) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y). hal ini berarti hipotesis kelima yang menyatakan bahwa variabel komunikasi (X_1), sumber daya (X_2), disposisi (X_3), dan struktur birokrasi (X_4) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y), **dapat diterima.**

⁵² Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

d. Hasil Uji t

Untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel komunikasi (X_1), sumber daya (X_2), disposisi (X_3), dan struktur birokrasi (X_4) terhadap variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y) digunakan uji t. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$; maka diketahui nilai t_{tabel} sebesar 1,684. Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai t_{hitung} seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.4. Kurva Uji t ⁵³

Berdasarkan gambar 4.4 di atas, dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel bebas (*independen*) terhadap variabel terikat (*dependen*) sebagai berikut:

1. Variabel Komunikasi (X_1)

Berdasarkan gambar 4.4 diketahui nilai t_{hitung} variabel komunikasi (X_1) sebesar 3,252. Dengan menggunakan tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$ nilai t_{tabel}

⁵³ Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5

sebesar 1,691. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$. maka dapat disimpulkan bahwa variabel komunikasi (X_1) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y), sehingga hipotesis pertama yang menyatakan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel komunikasi (X_1) terhadap variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y), **diterima**.

2. Variabel Sumber Daya (X_2)

Berdasarkan gambar 4.4 diketahui nilai t_{hitung} variabel sumber daya (X_2) sebesar 2,637. Dengan menggunakan tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$ nilai t_{tabel} sebesar 1,691. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$. maka dapat disimpulkan bahwa variabel sumber daya (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y), sehingga hipotesis kedua yang menyatakan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel sumber daya (X_2) terhadap variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y), **diterima**.

3. Variabel Disposisi (X_3)

Berdasarkan gambar 4.4 diketahui nilai t_{hitung} variabel disposisi (X_3) sebesar 0,099. Dengan menggunakan tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$ nilai t_{tabel} sebesar 1,691. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai $t_{hitung} < \text{nilai } t_{tabel}$. maka dapat disimpulkan bahwa variabel disposisi (X_3) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y), sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan adanya

pengaruh yang signifikan antara variabel disposisi (X_3) terhadap variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y), **ditolak**.

4. Variabel Struktur Birokrasi (X_4)

Berdasarkan gambar 4.4 diketahui nilai t_{hitung} variabel struktur birokrasi (X_4) sebesar 1,798. Dengan menggunakan tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$ nilai t_{tabel} sebesar 1,691. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$. maka dapat disimpulkan bahwa variabel struktur birokrasi (X_4) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y), sehingga hipotesis keempat yang menyatakan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel struktur birokrasi (X_4) terhadap variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y), **diterima**.

4.2.4. Pembahasan Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa perhitungan persamaan regresi linier berganda adalah $\hat{Y} = 2,714 + 0,377X_1 + 0,251X_2 + 0,012X_3 + 0,238X_4$, dengan demikian dari keempat variabel tersebut, variabel komunikasi di dalam korelasinya memberikan pengaruh pada tingkat signifikan taraf yang kuat terhadap variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik. Sebab, jika variabel komunikasi mengalami kenaikan sebesar satu persen, korelasi terhadap kenaikan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik sebesar 0,377 persen baik secara parsial maupun simultan.

Hasil uji koefisien determinasi diketahui bahwa 91,7 persen implementasi kebijakan penyebaran informasi publik ditentukan oleh masing-masing variabel

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sedangkan sisanya sebesar 8,3 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diperhitungkan dalam model penelitian ini.

Hasil perhitungan dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen atau $\alpha = 0,05$; diperoleh nilai F_{tabel} sebesar $= 2,70$ sedangkan nilai F_{hitung} sebesar $= 79,98$. Dapat diketahui bahwa nilai $F_{\text{hitung}} > \text{nilai } F_{\text{tabel}}$ yaitu $79,98 > 2,70$; atau berada pada daerah penolakan H_0 . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel komunikasi (X_1), sumber daya (X_2), disposisi (X_3), dan struktur birokrasi (X_4) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y).

Hasil analisis Uji t dengan menggunakan tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$; maka diketahui nilai t_{tabel} sebesar 1,691. Diketahui nilai t_{hitung} variabel komunikasi (X_1) sebesar 3,252; nilai t_{hitung} variabel sumber daya (X_2) sebesar 2,637; nilai t_{hitung} variabel struktur birokrasi (X_4) sebesar 1,798. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai $t_{\text{hitung}} > \text{nilai } t_{\text{tabel}}$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel komunikasi (X_1), sumber daya (X_2), dan struktur birokrasi (X_4) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y), sehingga hipotesis pertama, kedua, dan keempat diterima.

Namun, nilai t_{hitung} variabel disposisi (X_3) sebesar 0,099; Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai $t_{\text{hitung}} < \text{nilai } t_{\text{tabel}}$. maka dapat disimpulkan bahwa variabel disposisi (X_3) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y), sehingga

hipotesis ketiga yang menyatakan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel disposisi (X_3) terhadap variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y) ditolak. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pegawai Diskominfo Kota Depok yang belum memiliki kesadaran akan komitmen dan sikapnya untuk terus secara kontinyu menyebarkan informasi kebijakan publik tentang *Depok Cyber City* (DCC).

BAB V

KESIMPULAN dan SARAN

5.3. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dari bab yang telah dilakukan sebelumnya, maka Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel komunikasi (X_1) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y), sehingga hipotesis pertama yang menyatakan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel komunikasi (X_1) terhadap variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y) **diterima**.
2. Variabel sumber daya (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y), sehingga hipotesis kedua yang menyatakan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel sumber daya (X_2) terhadap variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y) **diterima**.
3. Variabel disposisi (X_3) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y), sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel disposisi (X_3) terhadap variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y) **ditolak**.

4. Variabel struktur birokrasi (X_4) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y), sehingga hipotesis keempat yang menyatakan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel struktur birokrasi (X_4) terhadap variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Y) **diterima**.
5. Secara simultan, yang dibuktikan dengan uji F, bahwa variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi, berpengaruh secara positif terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik mengenai *Depok Cyber City* (DCC) di Kota Depok. Artinya, implementasi kebijakan tersebut sudah cukup berhasil.

5.4. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam rangka meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik, beberapa masukan yang penting untuk diperhatikan adalah :

1. Dalam upaya meningkatkan dukungan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi publik, faktor komunikasi yang memiliki pengaruh paling besar, baik secara simultan maupun parsial, hendaknya tetap dipertahankan. Bahkan, senantiasa harus ditingkatkan agar keberhasilan penyebaran informasi publik lebih baik lagi.
2. Faktor sumber daya yang memiliki pengaruh signifikan setelah komunikasi juga perlu ditingkatkan melalui beberapa strategi seperti

menambah SDM, melengkapi fasilitas pendukung, penambahan dana program.

3. Faktor disposisi harus menjadi perhatian lebih dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain. Sebab, faktor ini sesuai hasil penelitian ini belum memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial. Meskipun secara simultan memiliki pengaruh. Cara meningkatkannya misalnya dengan memberikan pelatihan-pelatihan motivasi kerja, keterampilan dalam memenuhi SOP organisasi, dan sebagainya.
4. Untuk mewujudkan penyebaran informasi publik yang cepat, mudah dan merata, perlu adanya koordinasi yang intens dan berkelanjutan antar atau lintas OPD. Oleh karena itu, faktor struktur birokrasi yang memiliki pengaruh cukup signifikan harus ditingkatkan lagi demi keberhasilan penyebaran informasi publik di Kota Depok.
5. Karena keterbatasan penelitian ini, maka diperlukan penelitian lanjutan yang lebih komplit. Misalnya dengan meneliti tanggapan warga Depok terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi publik mengenai *Depok Cyber City*. Sehingga, dengan mengetahui pendapat warga tentang penyebaran informasi publik mengenai *Depok Cyber City* tersebut dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang kuat dan lemah berdasarkan model implementasi model George C. Edwards III.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI-Puslit KP2W.
- Azwar, S. 1995. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiman, Ahmad. 2011. *Bunga Rampai Model Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* (terj.). Yogyakarta: UGM Press.
- Kerlinger, Fred N. 2004. *Asas-asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: UGM Press.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy (edisi revisi)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pace, R. Wyane & Don F. Faules. 2006. *Komunikasi Organisasi* (terj.). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rusidi. 1989. *Pedoman Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: IKOPIN
- Sandjaja, B, dan Albertus Heriyanto. 2011. *Panduan Penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2011.
- Sinambela, Lijan Poltak, et.al. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik. Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sugiyono. 2003. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Thoha Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Umar, Husein. 2010. *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Uno B., Hamzah. 2007. *Teori Motivasi dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Utomo, Warsito. 2006. *Administrasi Publik Baru Indonesia, Perubahan Pradigma dari Adnistrasi Negara ke Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 14 tahun 2008. Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. et.al. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Wiryanto. 2006. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Grasindo.

Sumber lain

Tesis:

- Paramita, Winda. 2012. *Analisis Faktor Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi pada Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya dan Cianjur*. Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
- Riyanto, Eko Slamet. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Melalui Forum Tatap Muka di Badan Informasi Publik Kemkominfo*. Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.

Tahir, Arifin. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo*. Universitas Negeri Gorontalo.

Majalah:

Warta Depok, Edisi 4/April 2012.

Surat Kabar:

Monitor Depok, 6 Mei 2013

Website:

<http://arenakami.blogspot.com/2012/06/implementasi-kebijakan-george-edward.html>.

<http://rumakom.wordpress.com/2011/05/23/pejuang-kajian-keterbukaan-informasi-publik>.

Lampiran1. Instrumen Penelitian

KUESIONER

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEBERAN INFORMASI PUBLIK MENGENAI *DEPOK CYBER CITY* PADA DINAS KOMINFO KOTA DEPOK

A. Identitas Responden

1. Nomor Responden :(kosongkan)
2. Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan
3. Usia :tahun
3. Riwayat Pendidikan: 1. SMA/ sederajat 2. D1-D3 3. S1 4. S2
5. S3
4. Jabatan/Golongan :

B. Daftar Pertanyaan :

(mohon lihat di halaman berikutnya)

No	Pernyataan	Alternatif Pilihan				
		A.	B.	C.	D.	E.
1.	Diskominfo mengadakan penyuluhan/sosialisasi mengenai kebijakan <i>Depok Cyber City</i>	A. Sangat Sering	B. Sering	C. Cukup	D. Kadang-kadang	E. Tidak Pernah
2.	Diskominfo mengadakan pelatihan tentang IT atau TI (Teknologi Informasi) untuk mendukung program <i>Depok Cyber City</i>	A. Sangat Sering	B. Sering	C. Cukup	D. Kadang-kadang	E. Tidak Pernah
3.	Bahasa yang digunakan dalam penyuluhan/sosialisasi mengenai <i>Depok Cyber City</i>	A. Sangat Jelas	B. Jelas	C. Netral	D. Tidak Jelas	E. Sangat Tidak Jelas
4.	Materi tertulis yang digunakan dalam penyuluhan/penyebaran informasi mengenai <i>Depok Cyber City</i>	A. Sangat Jelas	B. Jelas	C. Netral	D. Tidak Jelas	E. Sangat Tidak Jelas
5.	Sosialisasi/penyebaran informasi mengenai <i>Depok Cyber City</i> juga disampaikan Diskominfo secara tidak langsung	A. Sangat Sering	B. Sering	C. Cukup	D. Kadang-kadang	E. Tidak Pernah
6.	Tersedianya Pedoman cara pelaksanaan sosialisasi/penyebaran informasi mengenai <i>Depok Cyber City</i>	A. Sangat Memadai	B. Memadai	C. Netral	D. Tidak Memadai	E. Sangat Tidak Memadai
7.	Tingkat kejelasan isi/substansi pedoman pelaksanaan sosialisasi/penyebaran informasi mengenai <i>Depok Cyber City</i>	A. Sangat Jelas	B. Jelas	C. Netral	D. Tidak Jelas	E. Sangat Tidak Jelas
8.	Tingkat pemahaman Bapak/Ibu terhadap tujuan kebijakan <i>Depok Cyber City</i>	A. Sangat Paham	B. Paham	C. Netral	D. Tidak Paham	E. Sangat Tidak Paham
9.	Menurut Bapak/Ibu	A.	B.	C.	D.	E.

	jumlah tenaga (SDM) dalam program sosialisasi/penyebaran informasi mengenai <i>Depok Cyber City</i>	Sangat Memadai	Memadai	Netral	Tidak Memadai	Sangat Tidak Memadai
10	Keterlibatan Bapak/Ibu dalam program sosialisasi/penyebaran informasi mengenai <i>Depok Cyber City</i>	A. Sangat Sering	B. Sering	C. Cukup	D. Kadang-kadang	E. Tidak Pernah
11	Menurut Bapak/Ibu ketersediaan Fasilitas dalam mendukung kebijakan <i>Depok Cyber City</i>	A. Sangat Lengkap	B. Lengkap	C. Cukup Lengkap	D. Tidak Lengkap	E. Sangat Tidak Lengkap
12	Menurut Bapak/Ibu ketersediaan Bahan untuk mendukung sosialisasi/penyebaran informasi mengenai <i>Depok Cyber City</i>	A. Sangat Lengkap	B. Lengkap	C. Cukup Lengkap	D. Tidak Lengkap	E. Sangat Tidak Lengkap
13	Menurut Bapak/Ibu kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana dalam mendukung kebijakan <i>Depok Cyber City</i>	A. Sangat Mudah	B. Mudah	C. Cukup Mudah	D. Tidak Mudah	E. Sangat Tidak Mudah
14	Menurut Bapak/Ibu keterpeliharaan sarana/prasarana/fasilitas dalam mendukung <i>Depok Cyber City</i>	A. Sangat Terpeliharaan	B. Terpeliharaan	C. Cukup	D. Tidak Terpeliharaan	E. Sangat Tidak Terpeliharaan
15	Menurut Bapak/Ibu Pemerintah Pusat/Kemenkominfo memberikan bantuan khusus untuk program penyebaran informasi mengenai <i>Depok Cyber City</i>	A. Sangat Sering	B. Sering	C. Cukup	D. Kadang-kadang	E. Tidak Pernah
16	Menurut Bapak/Ibu ketersediaan dana dalam penyenggaraan penyebaran informasi mengenai <i>Depok Cyber City</i>	A. Sangat Memadai	B. Memadai	C. Netral	D. Tidak Memadai	E. Sangat Tidak Memadai

17	Bapak/Ibu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan mengenai <i>Depok Cyber City</i>	A. Sangat Berusaha	B. Berusaha	C. Cukup	D. Kadang-kadang	E. Tidak Pernah
18	Menurut Bapak/Ibu pemberian insentif dalam melaksanakan program sosialisasi/penyebaran informasi mengenai <i>Depok Cyber City</i>	A. Sangat Sering	B. Sering	C. Cukup	D. Kadang-kadang	E. Tidak Pernah
19	Menurut Bapak/Ibu insentif diberikan sesaat setelah pelaksanaan sosialisasi/penyebaran informasi mengenai <i>Depok Cyber City</i>	A. Sangat Sering	B. Sering	C. Cukup	D. Kadang-kadang	E. Tidak Pernah
20	Insentif yang diberikan bernilai penting bagi Bapak/Ibu	A. Sangat bernilai	B. Bernilai	C. Cukup Bernilai	D. Kurang Bernilai	E. Tidak Bernilai
21	Menurut Bapak/Ibu ketersediaan Standard Operating Procedures (SOP) dalam mendukung sosialisasi/penyebaran informasi mengenai <i>Depok Cyber City</i>	A. Sangat Memadai	B. Memadai	C. Netral	D. Tidak Memadai	E. Sangat Tidak Memadai
22	Menurut Bapak/Ibu Kejelasan SOP sebagai acuan dalam melaksanakan sosialisasi/penyebaran informasi mengenai <i>Depok Cyber City</i>	A. Sangat Jelas	B. Jelas	C. Netral	D. Tidak Jelas	E. Sangat Tidak Jelas
23	Menurut Bapak/Ibu Ketersediaan tim khusus dalam pelaksanaan sosialisasi/penyebaran informasi mengenai <i>Depok Cyber City</i>	A. Sangat Memadai	B. Memadai	C. Netral	D. Tidak Memadai	E. Sangat Tidak Memadai

24	Menurut Bapak/Ibu Ketersediaan <i>Job Description</i> yang dimiliki anggota tim	A. Sangat Memadai	B. Memadai	C. Netral	D. Tidak Memadai	E. Sangat Tidak Memadai
25	Menurut Bapak/Ibu Diskominfo Kota Depok mengadakan pertemuan berkala dengan komunitas IT untuk menyukseskan program <i>Depok Cyber City</i>	A. Sangat Sering	B. Sering	C. Cukup	D. Kadang-kadang	E. Tidak Pernah
26	Menurut Bapak/Ibu sosialisasi/penyebaran informasi mengenai <i>Depok Cyber City</i> telah berhasil dikomunikasikan dengan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) di Kota Depok	A. Sangat Setuju	B. Setuju	C. Netral	D. Tidak Setuju	E. Sangat Tidak Setuju
27	Menurut Bapak/Ibu sosialisasi/penyebaran informasi mengenai <i>Depok Cyber City</i> telah dilakukan sesuai sasaran dan tujuannya	A. Sangat Setuju	B. Setuju	C. Netral	D. Tidak Setuju	E. Sangat Tidak Setuju
28	Menurut Bapak/Ibu sosialisasi/penyebaran informasi mengenai <i>Depok Cyber City</i> telah menjangkau ke semua elemen (OPD, komunitas IT dan bisnis, serta masyarakat) se-Kota Depok	A. Sangat Setuju	B. Setuju	C. Netral	D. Tidak Setuju	E. Sangat Tidak Setuju
29	Menurut Bapak/Ibu semua pegawai Diskominfo Kota Depok tidak hanya mengetahui tentang program <i>Depok Cyber City</i> , tetapi juga ikut	A. Sangat Setuju	B. Setuju	C. Netral	D. Tidak Setuju	E. Sangat Tidak Setuju

	terlibat dalam mensosialisasikan/me nyebarkan program prioritas Pemkot Depok tersebut					
30	Menurut Bapak/Ibu semua pegawai Diskominfo siap dan mampu menyukseskan kebijakan <i>Depok Cyber City</i>	A. Sangat Setuju	B. Setuju	C. Netral	D. Tidak Setuju	E. Sangat Tidak Setuju
31	Menurut Bapak/Ibu Diskominfo Kota Depok telah mampu melakukan koordinasi yang baik dengan OPD-OPD yang lain dalam menyukseskan program <i>Depok Cyber City</i>	A. Sangat Setuju	B. Setuju	C. Netral	D. Tidak Setuju	E. Sangat Tidak Setuju
32	Penilaian umum Bapak/Ibu terhadap keberhasilan sosialisasi/penyebaran informasi mengenai <i>Depok Cyber City</i> di Kota Depok	A. Sangat Berhasil	B. Berhasil	C. Netral	D. Tidak Berhasil	E. Sangat Tidak Berhasil

Lampiran 2: Data Hasil Penelitian

NO	GENDER	USIA	PEND	GOL	BUTIR SOAL															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	31	S1	III	3	5	4	4	3	4	5	4	3	5	4	4	3	4	5	4
2	2	44	S2	IV	2	5	2	3	2	4	4	2	2	5	2	3	2	4	4	2
3	2	44	S2	IV	1	5	3	3	1	3	5	3	1	5	3	3	1	3	5	3
4	2	28	S1	III	3	5	3	3	3	3	4	3	3	5	3	3	3	3	4	3
5	2	32	S1	III	3	2	4	3	3	4	4	4	3	2	4	3	3	4	4	4
6	1	32	S1	III	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
7	2	41	S2	IV	3	5	4	4	3	4	5	4	3	5	4	4	3	4	5	4
8	1	35	S2	III	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4
9	1	36	S2	III	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10	1	40	S1	III	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3
11	1	39	D1-D3	II	3	5	5	5	3	4	4	5	5	5	5	5	3	4	4	5
12	2	40	S1	IV	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	1	35	S2	IV	4	5	3	5	4	3	4	3	4	5	3	5	4	3	4	3
14	2	24	SMA	II	3	5	3	5	3	4	5	3	3	5	3	5	3	4	5	3
15	2	33	S1	III	3	5	3	5	3	4	5	3	3	5	3	5	3	4	5	3
16	2	32	S1	III	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17	1	24	SMA	II	3	5	3	2	3	4	5	3	3	5	3	5	3	4	5	3
18	1	32	S1	III	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4
19	2	37	S2	III	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
20	1	47	D1-D3	II	3	5	3	2	3	4	5	3	3	5	3	5	3	4	5	3
21	1	40	S2	IV	3	5	3	2	3	4	5	3	5	5	3	5	3	4	5	3
22	2	21	SMA	II	3	5	3	2	3	4	5	3	5	5	3	5	3	4	5	3
23	1	23	D1-D3	II	3	5	3	2	3	4	5	3	5	5	3	5	3	4	5	3
24	2	37	S2	IV	4	4	4	2	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4
25	1	33	S1	III	3	5	3	5	3	4	5	3	3	5	3	5	3	4	5	3
26	1	39	D1-D3	II	3	5	3	5	3	4	5	3	3	5	3	5	3	4	5	3
27	2	22	S1	III	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
28	2	28	S1	III	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4
29	2	40	S1	III	3	2	3	4	3	5	5	3	3	2	3	4	3	5	5	3
30	1	30	S1	III	4	5	3	4	4	3	3	3	4	5	3	4	4	3	3	3
31	2	38	S2	IV	3	5	3	3	3	4	4	3	3	5	3	3	3	4	4	3
32	1	41	S2	IV	3	3	5	2	3	5	5	5	3	3	5	5	3	5	5	5
33	1	38	S1	III	2	4	3	3	2	4	4	3	4	4	3	3	2	4	4	3
34	2	24	S1	III	2	5	3	4	2	4	4	3	2	5	3	4	2	4	4	3

Lanjutan.....

BUTIR SOAL																X1	X2	X3	X4	Y	RES_1	Het
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32							
3	5	4	4	3	5	4	4	3	3	5	4	4	3	4	5	32	32	16	19	28	0.47559	0.48
2	5	2	3	2	5	2	3	2	2	5	2	3	2	4	4	24	24	12	14	22	0.7378	0.74
1	5	3	3	1	5	3	3	1	1	5	3	3	1	3	5	24	24	12	13	21	-0.0241	0.02
3	5	3	3	3	5	3	3	3	3	5	3	3	3	3	4	27	27	14	17	24	0.11584	0.12
3	2	4	3	3	2	4	3	3	3	2	4	3	3	4	4	27	27	12	15	23	-0.38486	0.38
3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	26	26	13	16	23	-0.00632	0.01
3	5	4	4	3	5	4	4	3	3	5	4	4	3	4	5	32	32	16	19	28	0.47559	0.48
4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	34	35	17	21	28	-1.51956	1.52
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24	24	12	15	21	-0.50029	0.5
3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	27	27	13	16	24	0.36549	0.37
3	5	5	5	3	5	5	5	3	3	5	5	5	3	4	4	34	36	18	21	29	-0.78215	0.78
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24	24	12	15	21	-0.50029	0.5
4	5	3	5	4	5	3	5	4	4	5	3	5	4	3	4	31	31	17	21	28	0.61604	0.62
3	5	3	5	3	5	3	5	3	3	5	3	5	3	4	5	31	31	16	19	28	1.10378	1.1
3	5	3	5	3	5	3	5	3	3	5	3	5	3	4	5	31	31	16	19	28	1.10378	1.1
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24	24	12	15	21	-0.50029	0.5
3	5	3	5	3	5	3	5	3	3	5	3	5	3	4	5	28	31	16	19	28	2.23526	2.24
3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	27	27	14	17	23	-0.88416	0.88
3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	25	25	13	16	22	-0.37813	0.38
3	5	4	5	3	5	3	5	3	3	5	3	5	3	4	3	28	31	17	19	26	0.2237	0.22
3	5	3	2	3	5	3	5	3	3	5	3	5	3	4	3	28	33	13	19	26	-0.23214	0.23
3	5	3	2	3	5	3	5	3	3	5	3	5	3	4	3	28	33	13	19	26	-0.23214	0.23
3	5	4	5	3	5	3	5	3	3	5	3	5	3	4	3	28	33	17	19	26	-0.27836	0.28
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30	33	16	20	28	0.74078	0.74
5	5	5	4	3	5	3	5	3	3	5	3	3	3	4	5	31	31	19	19	26	-0.93088	0.93
3	5	3	5	3	5	3	5	3	3	5	3	3	3	4	5	31	31	16	19	26	-0.89622	0.9
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24	24	12	15	21	-0.50029	0.5
3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	30	30	15	18	26	-0.01838	0.02
3	2	3	4	3	2	3	4	3	3	2	3	4	3	5	5	28	28	12	15	25	0.98695	0.99
4	5	3	4	4	5	3	4	4	4	5	3	4	4	3	3	29	29	16	22	26	-0.35411	0.35
3	5	3	3	3	5	3	3	3	3	5	3	3	3	4	4	28	28	14	17	25	0.48765	0.49
5	3	5	5	3	3	5	5	3	3	3	5	3	3	5	5	31	34	18	19	27	-0.67242	0.67
2	4	3	3	2	4	3	3	2	2	4	3	3	2	4	4	25	27	12	14	22	-0.39245	0.39
5	5	3	4	2	5	3	4	2	2	5	3	4	2	4	4	27	27	17	16	24	0.31927	0.32

Lampiran 3: Uji Validitas dan Reliabilitas

3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Komunikasi (X₁)

Correlations

Variabel Komunikasi (X ₁)	K.1	K.2	K.3	K.4	K.5	K.6	K.7	K.8	Total	
Komunikasi1	Pearson Correlation	1	-.039	.275	.124	1.000**	-.022	-.117	.275	.500**
	Sig. (2-tailed)		.827	.115	.483	.000	.900	.511	.115	.003
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Komunikasi2	Pearson Correlation	-.039	1	-.177	.158	-.039	.006	.458**	-.177	.427*
	Sig. (2-tailed)	.827		.317	.371	.827	.971	.006	.317	.012
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Komunikasi3	Pearson Correlation	.275	-.177	1	.089	.275	.292	.116	1.000**	.590**
	Sig. (2-tailed)	.115	.317		.617	.115	.094	.515	.000	.000
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Komunikasi4	Pearson Correlation	.124	.158	.089	1	.124	-.038	.041	.089	.488**
	Sig. (2-tailed)	.483	.371	.617		.483	.831	.817	.617	.003
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Komunikasi5	Pearson Correlation	1.000**	-.039	.275	.124	1	-.022	-.117	.275	.500**
	Sig. (2-tailed)	.000	.827	.115	.483		.900	.511	.115	.003
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Komunikasi6	Pearson Correlation	-.022	.006	.292	-.038	-.022	1	.653**	.292	.470**
	Sig. (2-tailed)	.900	.971	.094	.831	.900		.000	.094	.005
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Komunikasi7	Pearson Correlation	-.117	.458**	.116	.041	-.117	.653**	1	.116	.567**
	Sig. (2-tailed)	.511	.006	.515	.817	.511	.000		.515	.000
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Komunikasi8	Pearson Correlation	.275	-.177	1.000**	.089	.275	.292	.116	1	.590**
	Sig. (2-tailed)	.115	.317	.000	.617	.115	.094	.515		.000
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Total	Pearson Correlation	.500**	.427*	.590**	.488**	.500**	.470**	.567**	.590**	1
	Sig. (2-tailed)	.003	.012	.000	.003	.003	.005	.000	.000	
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.701	9

3.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Sumber Daya (X₂)

Correlations

Variabel Sumber Daya (X ₂)		SD.1	SD.2	SD.3	SD.4	SD.5	SD.6	SD.7	SD.8	Total
Sumberdaya1	Pearson Correlation	1	.164	.294	.414*	.630**	.150	.109	.294	.662**
	Sig. (2-tailed)		.353	.091	.015	.000	.397	.541	.091	.000
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Sumberdaya2	Pearson Correlation	.164	1	-.177	.429*	-.039	.006	.458**	-.177	.460**
	Sig. (2-tailed)	.353		.317	.011	.827	.971	.006	.317	.006
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Sumberdaya3	Pearson Correlation	.294	-.177	1	.226	.275	.292	.116	1.000**	.550**
	Sig. (2-tailed)	.091	.317		.199	.115	.094	.515	.000	.001
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Sumberdaya4	Pearson Correlation	.414*	.429*	.226	1	.308	.449**	.659**	.226	.815**
	Sig. (2-tailed)	.015	.011	.199		.076	.008	.000	.199	.000
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Sumberdaya5	Pearson Correlation	.630**	-.039	.275	.308	1	-.022	-.117	.275	.458**
	Sig. (2-tailed)	.000	.827	.115	.076		.900	.511	.115	.007
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Sumberdaya6	Pearson Correlation	.150	.006	.292	.449**	-.022	1	.653**	.292	.550**
	Sig. (2-tailed)	.397	.971	.094	.008	.900		.000	.094	.001
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Sumberdaya7	Pearson Correlation	.109	.458**	.116	.659**	-.117	.653**	1	.116	.663**
	Sig. (2-tailed)	.541	.006	.515	.000	.511	.000		.515	.000
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Sumberdaya8	Pearson Correlation	.294	-.177	1.000**	.226	.275	.292	.116	1	.550**
	Sig. (2-tailed)	.091	.317	.000	.199	.115	.094	.515		.001
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Total	Pearson Correlation	.662**	.460**	.550**	.815**	.458**	.550**	.663**	.550**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.006	.001	.000	.007	.001	.000	.001	
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.740	9

3.3 Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Disposisi (X₃)

Correlations

Variabel Disposisi (X ₃)		Disposisi1	Disposisi2	Disposisi3	Disposisi4	Total
Disposisi1	Pearson Correlation	1	.016	.463**	.343*	.655**
	Sig. (2-tailed)		.930	.006	.047	.000
	N	34	34	34	34	34
Disposisi2	Pearson Correlation	.016	1	-.031	.229	.539**
	Sig. (2-tailed)	.930		.863	.194	.001
	N	34	34	34	34	34
Disposisi3	Pearson Correlation	.463**	-.031	1	.420*	.643**
	Sig. (2-tailed)	.006	.863		.013	.000
	N	34	34	34	34	34
Disposisi4	Pearson Correlation	.343*	.229	.420*	1	.772**
	Sig. (2-tailed)	.047	.194	.013		.000
	N	34	34	34	34	34
Total	Pearson Correlation	.655**	.539**	.643**	.772**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	
	N	34	34	34	34	34

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.749	5

3.4 Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Struktur Birokrasi (X₄)

Correlations

Struktur Birokrasi		Struktur Birokrasi1	Struktur Birokrasi2	Struktur Birokrasi3	Struktur Birokrasi4	Struktur Birokrasi5	Total
Struktur Birokrasi1	Pearson Correlation	1	-.039	.275	.308	1.000**	.706**
	Sig. (2-tailed)		.827	.115	.076	.000	.000
	N	34	34	34	34	34	34
Struktur Birokrasi2	Pearson Correlation	-.039	1	-.177	.429*	-.039	.531**
	Sig. (2-tailed)	.827		.317	.011	.827	.001
	N	34	34	34	34	34	34
Struktur Birokrasi3	Pearson Correlation	.275	-.177	1	.226	.275	.398*
	Sig. (2-tailed)	.115	.317		.199	.115	.020
	N	34	34	34	34	34	34
Struktur Birokrasi4	Pearson Correlation	.308	.429*	.226	1	.308	.756**
	Sig. (2-tailed)	.076	.011	.199		.076	.000
	N	34	34	34	34	34	34
Struktur Birokrasi5	Pearson Correlation	1.000**	-.039	.275	.308	1	.706**
	Sig. (2-tailed)	.000	.827	.115	.076		.000
	N	34	34	34	34	34	34
Total	Pearson Correlation	.706**	.531**	.398*	.756**	.706**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.020	.000	.000	
	N	34	34	34	34	34	34

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.729	6

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik (Y)

Correlations

Variabel Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik (Y)		DCC1	DCC2	DCC3	DCC4	DCC5	DCC6	DCC7	Total
Implementasi DCC1	Pearson Correlation	1	-.039	.275	.304	1.000**	-.022	-.259	.507**
	Sig. (2-tailed)		.827	.115	.080	.000	.900	.139	.002
	N	34	34	34	34	34	34	34	34
Implementasi DCC2	Pearson Correlation	-.039	1	-.177	.424*	-.039	.006	.176	.517**
	Sig. (2-tailed)	.827		.317	.013	.827	.971	.319	.002
	N	34	34	34	34	34	34	34	34
Implementasi DCC3	Pearson Correlation	.275	-.177	1	.102	.275	.292	.167	.446**
	Sig. (2-tailed)	.115	.317		.566	.115	.094	.344	.008
	N	34	34	34	34	34	34	34	34
Implementasi DCC4	Pearson Correlation	.304	.424*	.102	1	.304	.236	.021	.701**
	Sig. (2-tailed)	.080	.013	.566		.080	.180	.908	.000
	N	34	34	34	34	34	34	34	34
Implementasi DCC5	Pearson Correlation	1.000**	-.039	.275	.304	1	-.022	-.259	.507**
	Sig. (2-tailed)	.000	.827	.115	.080		.900	.139	.002
	N	34	34	34	34	34	34	34	34
Implementasi DCC6	Pearson Correlation	-.022	.006	.292	.236	-.022	1	.481**	.506**
	Sig. (2-tailed)	.900	.971	.094	.180	.900		.004	.002
	N	34	34	34	34	34	34	34	34
Implementasi DCC7	Pearson Correlation	-.259	.176	.167	.021	-.259	.481**	1	.422*
	Sig. (2-tailed)	.139	.319	.344	.908	.139	.004		.013
	N	34	34	34	34	34	34	34	34
Total	Pearson Correlation	.507**	.517**	.446**	.701**	.507**	.506**	.422*	1
	Sig. (2-tailed)	.002	.002	.008	.000	.002	.002	.013	
	N	34	34	34	34	34	34	34	34

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.698	8

Lampiran 4: Pengujian Persyaratan Analisis

UJI PERSYARATAN ANALISIS

4.1. Uji Normalitas

4.1.1 Uji Normalitas Variabel Implementasi Kebijakan Publik (Y) dengan Variabel Komunikasi (X₁)

Tests of Normality^{b,c,d,e}

	Komunikasi	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Implementasi DCC	24	.492	6	.000	.496	6	.000
	27	.367	5	.066	.684	5	.006
	28	.357	7	.060	.787	7	.030
	30	.260	2	.			
	31	.302	6	.094	.775	6	.035
	34	.260	2	.			

a. Lilliefors Significance Correction

4.1.2. Uji Normalitas Variabel Implementasi Kebijakan Publik (Y) dengan Variabel Sumber Daya (X₂)

Tests of Normality^{b,c,d,e,f,g,h,i,j}

	Sumberdaya	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Implementasi DCC	24	.492	6	.000	.496	6	.000
	27	.293	6	.117	.822	6	.091
	31	.360	7	.067	.664	7	.001
	33	.441	4	.	.630	4	.001

a. Lilliefors Significance Correction

**4.1.3 Uji Normalitas Variabel Implementasi Kebijakan Publik (Y)
dengan Variabel Disposisi (X₃)**

Tests of Normality^{c,d}

	Disposisi	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Implementasi DCC	12	.298	9	.082	.730	9	.003
	13	.243	5	.200 [*]	.894	5	.377
	14	.175	3	.	1.000	3	1.000
	16	.455	8	.000	.566	8	.000
	17	.231	5	.200 [*]	.881	5	.314
	18	.260	2	.			

*. This is a lower bound of the true significance.

**4.1.4 Uji Normalitas Variabel Implementasi Kebijakan Publik (Y)
dengan Variabel Struktur Birokrasi (X₄)**

Tests of Normality^{a,b,d,e,f}

	Struktur Birokrasi	Kolmogorov-Smirnov ^c			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Implementasi DCC	15	.392	6	.094	.701	6	.006
	16	.283	4	.	.863	4	.272
	17	.175	3	.	1.000	3	1.000
	19	.321	12	.081	.699	12	.001
	21	.385	3	.	.750	3	.000

4.2. Uji Homogenitas

4.2.1 Uji Homogenitas Variabel Implementasi Kebijakan Publik (Y) dengan Variabel Komunikasi (X₁)

Test of Homogeneity of Variances

Implementasi DCC

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1.786 ^a	7	24	.137

4.2.2 Uji Homogenitas Implementasi Kebijakan Publik (Y) dengan Sumber Daya (X₂)

Test of Homogeneity of Variances

Implementasi DCC

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
6.912 ^a	5	21	.110

4.2.3 Uji Homogenitas Variabel Implementasi Kebijakan Publik (Y) dengan Variabel Disposisi (X₃)

Test of Homogeneity of Variances

Implementasi DCC

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
.829 ^a	5	26	.541

**4.2.4. Uji Homogenitas Variabel Implementasi Kebijakan Publik (Y)
dengan Variabel Struktur Birokrasi (X₄)**

Test of Homogeneity of Variances

Implementasi DCC

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
3.136 ^a	5	24	.086

Lampiran 5: Hasil Analisis Distribusi Frekuensi

5.1 Hasil Analisis Distribusi Frekuensi Variabel Komunikasi (X₁)

Statistics

		K.1	K.2	K.3	K.4	K.5	K.6	K.7	K.8	Total
N	Valid	34	34	34	34	34	34	34	34	34
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		2.97	4.26	3.29	3.41	2.97	3.76	4.21	3.29	28.18
Std. Error of Mean		.099	.171	.108	.175	.099	.095	.139	.108	.507
Median		3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	28.00
Mode		3	5	3	3	3	4	5	3	28
Std. Deviation		.577	.994	.629	1.019	.577	.554	.808	.629	2.959
Variance		.332	.988	.396	1.037	.332	.307	.653	.396	8.756
Range		3	3	3	3	3	2	2	3	10
Minimum		1	2	2	2	1	3	3	2	24
Maximum		4	5	5	5	4	5	5	5	34
Sum		101	145	112	116	101	128	143	112	958

Komunikasi1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	2.9	2.9	2.9
2	3	8.8	8.8	11.8
Valid 3	26	76.5	76.5	88.2
4	4	11.8	11.8	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Komunikasi2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	2	5.9	5.9	5.9
3	7	20.6	20.6	26.5
Valid 4	5	14.7	14.7	41.2
5	20	58.8	58.8	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Komunikasi3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	1	2.9	2.9	2.9
3	24	70.6	70.6	73.5
Valid 4	7	20.6	20.6	94.1
5	2	5.9	5.9	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Komunikasi4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	7	20.6	20.6	20.6
3	12	35.3	35.3	55.9
Valid 4	9	26.5	26.5	82.4
5	6	17.6	17.6	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Komunikasi5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	2.9	2.9	2.9
2	3	8.8	8.8	11.8
Valid 3	26	76.5	76.5	88.2
4	4	11.8	11.8	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Komunikasi6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	10	29.4	29.4	29.4
4	22	64.7	64.7	94.1
5	2	5.9	5.9	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Komunikasi7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	8	23.5	23.5	23.5
4	11	32.4	32.4	55.9
5	15	44.1	44.1	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Komunikasi8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	1	2.9	2.9	2.9
3	24	70.6	70.6	73.5
4	7	20.6	20.6	94.1
5	2	5.9	5.9	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Komunikasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
24	6	17.6	17.6	17.6
25	2	5.9	5.9	23.5
26	1	2.9	2.9	26.5
27	5	14.7	14.7	41.2
28	7	20.6	20.6	61.8
Valid 29	1	2.9	2.9	64.7
30	2	5.9	5.9	70.6
31	6	17.6	17.6	88.2
32	2	5.9	5.9	94.1
34	2	5.9	5.9	100.0
Total	34	100.0	100.0	

5.2 Hasil Analisis Distribusi Frekuensi Variabel Sumber Daya (X₂)

Statistics

		SD.1	SD.2	SD.3	SD.4	SD.5	SD.6	SD.7	SD.8	Total
N	Valid	34	34	34	34	34	34	34	34	34
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		3.32	4.26	3.29	4.00	2.97	3.76	4.21	3.29	29.12
Std. Error of Mean		.162	.171	.108	.146	.099	.095	.139	.108	.613
Median		3.00	5.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	29.50
Mode		3	5	3	3 ^a	3	4	5	3	31
Std. Deviation		.945	.994	.629	.853	.577	.554	.808	.629	3.574
Variance		.892	.988	.396	.727	.332	.307	.653	.396	12.774
Range		4	3	3	2	3	2	2	3	12
Minimum		1	2	2	3	1	3	3	2	24
Maximum		5	5	5	5	4	5	5	5	36
Sum		113	145	112	136	101	128	143	112	990

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Sumberdaya1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	2.9	2.9	2.9
2	2	5.9	5.9	8.8
3	22	64.7	64.7	73.5
4	3	8.8	8.8	82.4
5	6	17.6	17.6	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Sumberdaya2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	2	5.9	5.9	5.9
3	7	20.6	20.6	26.5
4	5	14.7	14.7	41.2
5	20	58.8	58.8	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Sumberdaya3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	1	2.9	2.9	2.9
3	24	70.6	70.6	73.5
Valid 4	7	20.6	20.6	94.1
5	2	5.9	5.9	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Sumberdaya4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	12	35.3	35.3	35.3
Valid 4	10	29.4	29.4	64.7
5	12	35.3	35.3	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Sumberdaya5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	2.9	2.9	2.9
2	3	8.8	8.8	11.8
Valid 3	26	76.5	76.5	88.2
4	4	11.8	11.8	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Sumberdaya6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	10	29.4	29.4	29.4
Valid 4	22	64.7	64.7	94.1
5	2	5.9	5.9	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Sumberdaya7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	8	23.5	23.5	23.5
4	11	32.4	32.4	55.9
5	15	44.1	44.1	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Sumberdaya8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	1	2.9	2.9	2.9
3	24	70.6	70.6	73.5
4	7	20.6	20.6	94.1
5	2	5.9	5.9	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Sumberdaya

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
24	6	17.6	17.6	17.6
25	1	2.9	2.9	20.6
26	1	2.9	2.9	23.5
27	6	17.6	17.6	41.2
28	2	5.9	5.9	47.1
29	1	2.9	2.9	50.0
30	1	2.9	2.9	52.9
31	7	20.6	20.6	73.5
32	2	5.9	5.9	79.4
33	4	11.8	11.8	91.2
34	1	2.9	2.9	94.1
35	1	2.9	2.9	97.1
36	1	2.9	2.9	100.0
Total	34	100.0	100.0	

5.3 Hasil Analisis Distribusi Frekuensi Variabel Disposisi (X₃)

Statistics

		Disposisi1	Disposisi2	Disposisi3	Disposisi4	Total
N	Valid	34	34	34	34	34
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		3.18	4.26	3.41	3.79	14.65
Std. Error of Mean		.137	.171	.120	.157	.380
Median		3.00	5.00	3.00	4.00	14.50
Mode		3	5	3	3	12
Std. Deviation		.797	.994	.701	.914	2.214
Variance		.635	.988	.492	.835	4.902
Range		4	3	3	3	7
Minimum		1	2	2	2	12
Maximum		5	5	5	5	19
Sum		108	145	116	129	498

Disposisi1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	2.9	2.9	2.9
	2	2	5.9	5.9	8.8
	3	24	70.6	70.6	79.4
	4	4	11.8	11.8	91.2
	5	3	8.8	8.8	100.0
	Total	34	100.0	100.0	

Disposisi2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	5.9	5.9	5.9
	3	7	20.6	20.6	26.5
	4	5	14.7	14.7	41.2
	5	20	58.8	58.8	100.0
	Total	34	100.0	100.0	

Disposisi3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	1	2.9	2.9	2.9
3	21	61.8	61.8	64.7
Valid 4	9	26.5	26.5	91.2
5	3	8.8	8.8	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Disposisi4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	2	5.9	5.9	5.9
3	12	35.3	35.3	41.2
Valid 4	11	32.4	32.4	73.5
5	9	26.5	26.5	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Disposisi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
12	9	26.5	26.5	26.5
13	5	14.7	14.7	41.2
14	3	8.8	8.8	50.0
15	1	2.9	2.9	52.9
Valid 16	8	23.5	23.5	76.5
17	5	14.7	14.7	91.2
18	2	5.9	5.9	97.1
19	1	2.9	2.9	100.0
Total	34	100.0	100.0	

5.4 Hasil Analisis Distribusi Frekuensi Variabel Struktur Birokrasi (X₄)

Statistics

		Struktur Birokrasi1	Struktur Birokrasi2	Struktur Birokrasi3	Struktur Birokrasi4	Struktur Birokrasi5	Total
N	Valid	34	34	34	34	34	34
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		2.97	4.26	3.29	4.00	2.97	17.56
Std. Error of Mean		.099	.171	.108	.146	.099	.403
Median		3.00	5.00	3.00	4.00	3.00	18.50
Mode		3	5	3	3 ^a	3	19
Std. Deviation		.577	.994	.629	.853	.577	2.351
Variance		.332	.988	.396	.727	.332	5.527
Range		3	3	3	2	3	9
Minimum		1	2	2	3	1	13
Maximum		4	5	5	5	4	22
Sum		101	145	112	136	101	597

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Struktur Birokrasi1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	2.9	2.9	2.9
2	3	8.8	8.8	11.8
Valid 3	26	76.5	76.5	88.2
4	4	11.8	11.8	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Struktur Birokrasi2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	2	5.9	5.9	5.9
3	7	20.6	20.6	26.5
Valid 4	5	14.7	14.7	41.2
5	20	58.8	58.8	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Struktur Birokrasi3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	1	2.9	2.9	2.9
3	24	70.6	70.6	73.5
Valid 4	7	20.6	20.6	94.1
5	2	5.9	5.9	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Struktur Birokrasi4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	12	35.3	35.3	35.3
Valid 4	10	29.4	29.4	64.7
5	12	35.3	35.3	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Struktur Birokrasi5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	2.9	2.9	2.9
2	3	8.8	8.8	11.8
Valid 3	26	76.5	76.5	88.2
4	4	11.8	11.8	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Struktur Birokrasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
13	1	2.9	2.9	2.9
14	2	5.9	5.9	8.8
15	6	17.6	17.6	26.5
16	4	11.8	11.8	38.2
17	3	8.8	8.8	47.1
Valid 18	1	2.9	2.9	50.0
19	12	35.3	35.3	85.3
20	1	2.9	2.9	88.2
21	3	8.8	8.8	97.1
22	1	2.9	2.9	100.0
Total	34	100.0	100.0	

5.5. Hasil Analisis Distribusi Frekuensi Variabel Implementasi Kebijakan Publik (Y)

Statistics

	DCC1	DCC2	DCC3	DCC4	DCC5	DCC6	DCC7	Total
N Valid	34	34	34	34	34	34	34	34
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean	2.97	4.26	3.29	3.82	2.97	3.76	3.91	25.00
Std. Error of Mean	.099	.171	.108	.143	.099	.095	.142	.445
Median	3.00	5.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	26.00
Mode	3	5	3	3	3	4	3	26 ^a
Std. Deviation	.577	.994	.629	.834	.577	.554	.830	2.594
Variance	.332	.988	.396	.695	.332	.307	.689	6.727
Range	3	3	3	2	3	2	2	8
Minimum	1	2	2	3	1	3	3	21
Maximum	4	5	5	5	4	5	5	29
Sum	101	145	112	130	101	128	133	850

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Implementasi DCC1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	2.9	2.9	2.9
2	3	8.8	8.8	11.8
Valid 3	26	76.5	76.5	88.2
4	4	11.8	11.8	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Implementasi DCC2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	2	5.9	5.9	5.9
3	7	20.6	20.6	26.5
Valid 4	5	14.7	14.7	41.2
5	20	58.8	58.8	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Implementasi DCC3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	1	2.9	2.9	2.9
3	24	70.6	70.6	73.5
Valid 4	7	20.6	20.6	94.1
5	2	5.9	5.9	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Implementasi DCC4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	15	44.1	44.1	44.1
Valid 4	10	29.4	29.4	73.5
5	9	26.5	26.5	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Implementasi DCC5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	2.9	2.9	2.9
2	3	8.8	8.8	11.8
Valid 3	26	76.5	76.5	88.2
4	4	11.8	11.8	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Implementasi DCC6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	10	29.4	29.4	29.4
Valid 4	22	64.7	64.7	94.1
5	2	5.9	5.9	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Implementasi DCC7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	13	38.2	38.2	38.2
Valid 4	11	32.4	32.4	70.6
5	10	29.4	29.4	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Implementasi DCC

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
21	5	14.7	14.7	14.7
22	3	8.8	8.8	23.5
23	3	8.8	8.8	32.4
24	3	8.8	8.8	41.2
Valid 25	2	5.9	5.9	47.1
26	8	23.5	23.5	70.6
27	1	2.9	2.9	73.5
28	8	23.5	23.5	97.1
29	1	2.9	2.9	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Lampiran 6: Hasil Perhitungan Regresi

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Implementasi DCC	25.00	2.594	34
Komunikasi	28.18	2.959	34
Sumberdaya	29.12	3.574	34
Disposisi	14.65	2.214	34
Struktur Birokrasi	17.56	2.351	34

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.958 ^a	.917	.905	.798

a. Predictors: (Constant), Struktur Birokrasi, Disposisi, Sumberdaya, Komunikasi

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	203.549	4	50.887	79.980	.000 ^b
	Residual	18.451	29	.636		
	Total	222.000	33			

a. Dependent Variable: Implementasi DCC

b. Predictors: (Constant), Struktur Birokrasi, Disposisi, Sumberdaya, Komunikasi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.714	1.356		2.002	.055
	Komunikasi	.377	.116	.430	3.252	.003
	Sumberdaya	.251	.095	.346	2.637	.013
	Disposisi	.012	.116	.010	.099	.922
	Struktur Birokrasi	.238	.132	.216	1.798	.083

a. Dependent Variable: Implementasi DCC

